

**PERAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA
JAWA TIMUR PARK II
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI SEKITARNYA**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**Siska Anggraeni
0710210099**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

ROLE DEVELOPMENT OF JAWA TIMUR PARK II TOURISM AREA TO SOCIAL ECONOMIC IN SURROUNDING COMMUNITY

THESIS

**Siska Anggraeni
0710210099**

**Submitted As Partial Fulfillment Of Requirements
For The Degree Of Bachelor's Economics**



**ECONOMIC SCIENCE DEPARTMENT
ECONOMIC FACULTY
BRAWIJAYA UNIVERSITY
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya"

Yang disusun oleh :

Nama : Siska Anggraeni
NIM : 0710210099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **25 Juli 2014** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Asfi Manzilati, SE.,ME.
NIP. 19680911 199103 2 003
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE.,ME.
NIP. 19520415 197412 1 001
(Dosen Penguji I)
3. Wildan Syafitri, SE.,MEc.,Ph.D.
NIP. 19691210 199703 1 003
(Dosen Penguji II)



Malang, 12 Agustus 2014
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya

Yang disusun oleh :

Nama : Siska Anggraeni
NIM : 0710210099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, 18 Juli 2014
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,

Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001



Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.
NIP. 19680911 199103 2 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Siska Anggraeni
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 23 Mei 1990
NIM : 0710210099
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Keuangan Daerah
Alamat : Jl. Dewi Sartika III Kota Batu

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II
Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juli 2014

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Dr. Asfi Manzilati, SE., ME.
NIP. 19680911 199103 2 003

Yang membuat pernyataan,



Siska Anggraeni
NIM. 0710210099

Mengetahui,
Ketua
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D.
NIP. 19620315 198701 1 001

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siska Anggraeni
 Tempat & Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Mei 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Dewi Sartika Gg.III Kota Batu
 Alamat e-mail : anggraeni.siska75@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Sisir 06 Kota Batu, Tahun
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Kota Batu, Tahun
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Kota Batu, Tahun
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Tahun

Pengalaman Organisasi

1. Staff Muda Departemen Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Tahun
2. Sekretaris Departemen Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Tahun
3. DII

Pengalaman Lain

1. Mengikuti Kursus Brevet Pajak A, B dan C di Lembaga Kursus Ciptajasatama Kota Malang, Tahun 2012
2. Mengikuti Kursus Penyiaran di Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Malang, Tahun 2012
3. Magang Kerja Team Audit PNPM Divisi Accounting Ciptajasatama Kota Malang, Tahun 2012
4. Magang Kerja Team Audit PNPM Divisi Accounting Ciptajasatama Kota Malang, Tahun 2013
5. Penyiar di Stasiun Radio Komunitas Kartika FM Kota Batu, Tahun 2013
6. Staff Anggota DPD RI Bidang Keahlian di Ibu Kota Provinsi, Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam skripsi ini, pokok-pokok bahasan yang disajikan meliputi pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II di Kota Wisata Batu sebagai produk wisata baru yang diminati banyak wisatawan, peran pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terhadap kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitarnya serta peran pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada :

1. Dr. Asfi Manzilati, SE., ME. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D. selaku Ketua Jurusan EP yang memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
3. **Prof. Candra Fajri Ananda, SE., MSc., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya atas dukungannya.
4. Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya dalam kelancaran studi saya.
5. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAKSI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan Ekonomi	12
2.2. Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia	16
2.2.1. Definisi dan Jenis Pariwisata	19
2.3. Pariwisata sebagai Industri	22
2.3.1. Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja	30
2.4. Pariwisata serta Peranannya dalam Mendorong Perekonomian Daerah	34
2.4.1. Pariwisata Berbasis Masyarakat	39
2.4.2. Peran Pemerintah Daerah	44
2.5. Penelitian Terdahulu	48
2.6. Kerangka Pikir	52

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian	53
3.2. Unit Analisis	55

3.3. Penentuan Informan	55
3.4. Teknik Pengumpulan Data	56
3.5. Teknik Analisis Data	59
3.6. Keabsahan Data.....	61

BAB IV : PERAN PEMBANGUNAN JTP II TERHADAP KONDISI SOSIAL

MASYARAKAT

4.1. Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Keramaian.....	63
4.2. Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Lingkungan	73
4.3. Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Kesenjangan Sosial.....	79

BAB V : PERAN PEMBANGUNAN JTP II TERHADAP KONDISI SOSIAL

MASYARAKAT

5.1. Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Kesempatan Kerja Baru	86
5.2. Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Alih Fungsi Lahan.....	99
5.3. Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Akses	102

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

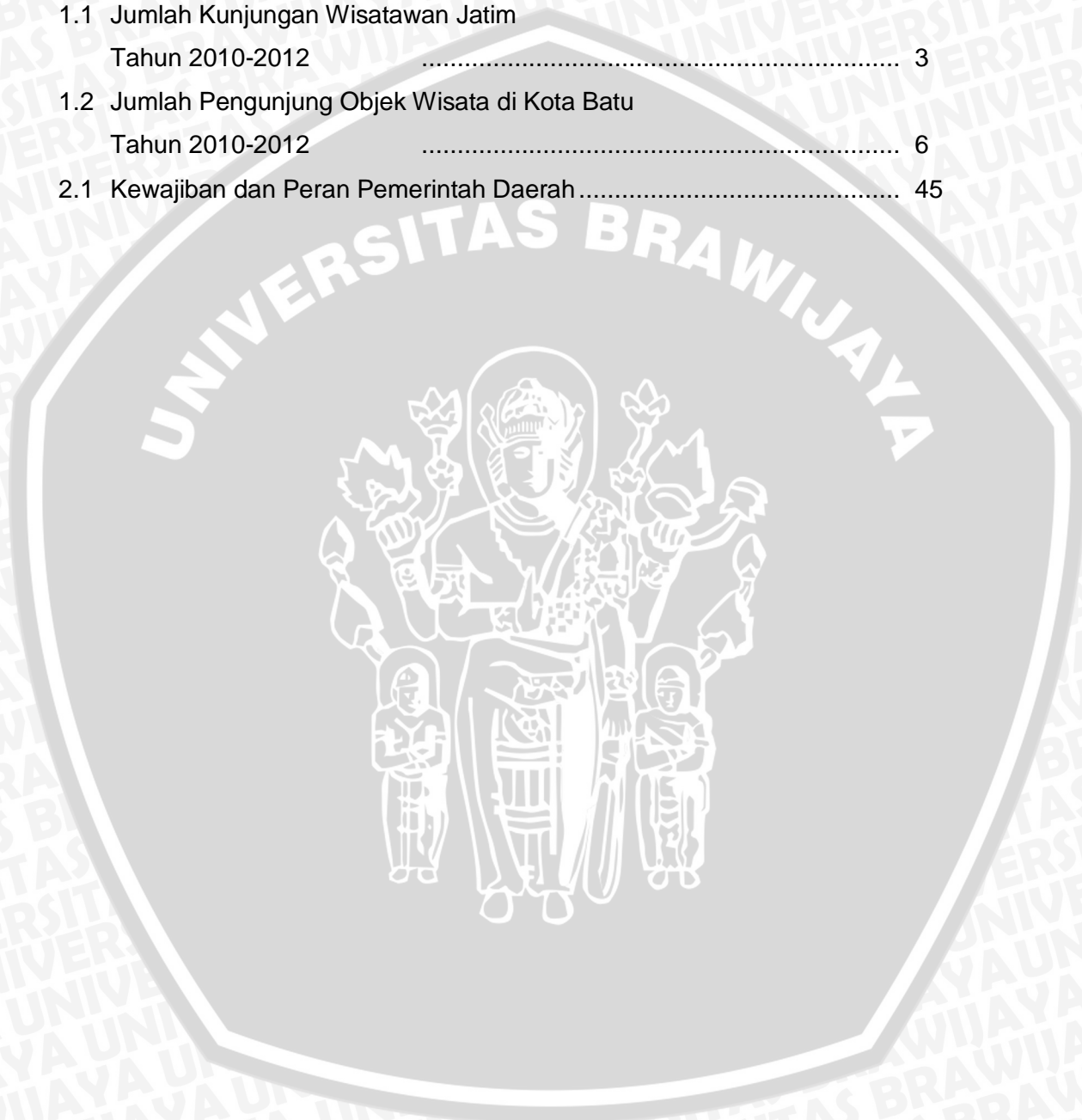
6.1. Kesimpulan	106
6.2. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	114
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Jatim Tahun 2010-2012	3
1.2	Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Batu Tahun 2010-2012	6
2.1	Kewajiban dan Peran Pemerintah Daerah	45



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1.1	Struktur Perekonomian Kota Batu Tahun 2012	7
2.1	Dampak Pembangunan Pariwisata.....	26
2.2	Mekanisme Penciptaan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata.....	33
2.3	<i>Good Tourism Governance</i> dalam Kepariwisataan.....	41
2.4	Kerangka Pikir	52
5.1	Responden Menurut Asal	95



ABSTRAKSI

Anggraeni, Siska. 2014. *Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya*. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Dr.Asfi Manzilati, SE., MS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dampak sosial yang dirasakan masyarakat adalah munculnya keramaian akibat banyaknya kunjungan wisatawan, (2) berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di sekitar, baik lingkungan sosial maupun kondisi lingkungan alam, (3) memicu terjadinya kesenjangan sosial antara pemilik modal dengan pihak minim modal yang tidak bisa membuka usaha pariwisata, (4) dampak ekonomi yang muncul adalah munculnya kesempatan kerja baru yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, (5) banyaknya alih fungsi bangunan tempat tinggal yang dijadikan sebagai lokasi usaha membuat banyak warga asli tergusur serta, (6) berbagai perbaikan infrastruktur juga dirasakan sebagai keuntungan akibat pembangunan tersebut.

Adapun memaksimalkan sinergi antara pihak pengelola wisata, masyarakat dan pemerintah merupakan solusi yang bisa dipakai untuk mengurangi dampak negatif yang timbul akibat pembangunan kawasan wisata tersebut. Memaksimalkan lembaga bentukan masyarakat lokal untuk turut serta dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan wisata serta menyediakan ruang bagi atraksi rakyat merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memaksimalkan keberadaan kawasan wisata tersebut.

Kata kunci: Pembangunan, Pembangunan Wisata, Sosial Ekonomi Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, saat ini sektor pariwisata mulai diperhitungkan dalam membantu pertumbuhan perekonomian disamping sektor utama seperti pertanian dan migas. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 9,39% di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,7% dan pada tahun 2013 sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa negara ke-4 setelah migas, batu bara, minyak kelapa sawit dan olahan yaitu sebesar Rp. 347 Triliun, atau 23% dari pendapatan negara dalam APBN-Perubahan 2013 (Tempo, 2014).

Sumbangan sektor pariwisata dalam perekonomian nasional diharapkan juga akan memberikan dampak yang sama kepada daerah yang mengembangkan sektor pariwisatanya. Seperti yang dikatakan Yoeti (2008), sektor pariwisata akan berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) sekaligus akan mempercepat proses pembangunan. Mengingat sektor pariwisata sangat mempengaruhi sektor-sektor lainnya yang berhubungan, bisa dikatakan bahwa pariwisata memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian. Definisi pariwisata sendiri berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam usaha untuk terus meningkatkan pariwisata, dibutuhkan peranan dan kerjasama antara banyak pihak yaitu masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, wisatawan itu sendiri serta pihak lain yang berkaitan. Dengan demikian tujuan pemerintah dalam membangun sektor pariwisata sebagai katalisator pembangunan akan dapat terwujud. Masih dalam UU No.10 Tahun 2009, disebutkan bahwa tujuan kepariwisataan antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

Dalam mencapai tujuannya tersebut pemerintah terus melakukan upaya inovasi dan juga promosi, baik dalam ajang nasional maupun internasional untuk memberikan stimulus bagi para pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan usahanya. Pelaku usaha yang dimaksud disini bukan hanya pengusaha sebagai pemilik modal, tapi juga pemerintah daerah, masyarakat lokal, ukm dan pihak lain yang harus siap mengikuti tren perkembangan pariwisata. Dengan adanya dukungan dari banyak pihak yang saling bersinergi bukan tidak mungkin bahwa

nantinya sektor pariwisata dapat digalakkan menjadi salah satu sektor unggulan yang memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan semakin tingginya peluang dalam mengembangkan pariwisata seharusnya bisa dijadikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk turut serta mengambil peluang tersebut. Apalagi sejak dicanangkannya sistem desentralisasi yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri, termasuk salah satunya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Pariwisata merupakan salah satu alternatif untuk mengadakan pembangunan bagi sebagian besar daerah di Indonesia, mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerahnya melalui penyediaan kebijakan, komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat yang bertindak langsung menghadapi wisatawan dan juga fungsi lainnya yang menjadikan daerah tersebut ramah terhadap pembangunan industri pariwisata. Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mampu mengembangkan sektor pariwisatanya dengan baik, hal ini ditandai dengan kunjungan wisatawan di Jawa Timur yang meningkat secara signifikan. Berikut data kunjungan wisatawan di Jawa Timur

Tabel 1.1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan di Jatim Tahun 2010-2012

	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Wisnus	25.148.283	27.297.828	33.224.659
Wisman	103.601	109.587	127.664

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur (2012)

Dari data diatas bisa dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kunjungan wisatawan baik wisnus dan wisman ke Provinsi Jatim terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dan hampir di seluruh wilayahnya memiliki sumber daya alam/buatan yang bisa menarik wisatawan. Selain itu akses yang mudah menuju berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur merupakan keuntungan tersendiri yang mempermudah akses para wisatawan menuju lokasi wisata yang tersebar di Provinsi ini.

Kota Batu merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang dikatakan mampu membaca peluang dalam pengembangan pariwisata. Pilihan Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisatanya kini membuat Kota tersebut terkenal dengan ikon kota wisatanya atau dengan sebutan Kota Wisata Batu. Kota batu terletak pada posisi $122^{\circ}17'-122^{\circ}57'$ bujur timur dan $7^{\circ}44'-8^{\circ}26'$ lintang selatan dengan luas wilayah sebesar 19.908,72 Ha atau 0,42% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Bentang geografi Kota Batu berupa perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian ± 800 meter di atas permukaan laut dan berada di lingkungan gunung Panderman (2.010 m) dan gunung Welirang/Kemukus (3.156 m). Hampir sebagian besar desa di Kota Batu merupakan areal perbukitan, berelief terjal dan relatif datar.

Kondisi yang seperti itu menjadikan Kota Batu memiliki hawa yang sejuk dengan suhu udara sebesar $17^{\circ}-25^{\circ}$ C. Sumber daya alam Kota Batu sendiri bisa dikatakan cukup melimpah, kawasan hutan meliputi hutan lindung dan hutan konvensional, terdapat juga lahan pertanian dan perkebunan (terutama kebun apel) yang pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk Kota Batu. Dengan sumber daya serta kondisi geografis dan topologi yang dimilikinya bisa dikatakan bahwa Kota Batu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan

pembangunan di banyak sektor terutama sektor pariwisata. Banyaknya pilihan wisata yang tersedia dari wisata alam dan buatan, memberikan banyak alternatif bagi wisatawan yang mengunjungi Kota Batu. Wisata alam yang ditawarkan di kota batu, antara lain: pemandian air panas Cagar, Coban Talun dan lainnya merupakan sumber daya yang sudah dikelola oleh pemerintah dan kemudian dikomersialisasikan untuk wisatawan. Sedangkan untuk memenuhi perkembangan pariwisata, kini objek wisata modern yang dikemas menjadi theme park mulai dikembangkan di Kota Batu, seperti Jawa Timur Park, Museum Satwa, Secret Zoo dan lainnya menjadi daya tarik tersendiri yang tak kalah menyedot banyak wisatawan yang datang.

Sadar dengan potensi yang dimilikinya, pemerintah Kota Batu memiliki visi pembangunan untuk tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan “Kota Batu Sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani” dan untuk mewujudkan visinya tersebut, pemerintah Kota Batu memiliki program dan kebijakan antara lain:

- a. Pembangunan pariwisata sebagai penggerak perekonomian, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
- b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata serta membuka peluang investasi.
- c. Mengembangkan potensi pariwisata yang berbasis pada alam dan obyek pariwisata buatan.
- d. Perpaduan antara sektor pertanian, agroindustri, budaya masyarakat melalui program *agrotourism* maupun *ecotourism*.
- e. Melaksanakan program-program seperti promosi pariwisata, pengembangan obyek wisata baru (termasuk desa wisata), peningkatan SDM pariwisata dan sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya pembangunan pariwisata, Kota Batu mulai melakukan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang datang. Dengan demikian diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan terus mengalami peningkatan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pembangunan objek wisata di Kota Batu, maka kunjungan wisatawan juga ikut meningkat. Berikut data jumlah pengunjung Kota Batu:

Tabel 1.2 : **Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Batu Tahun 2010-2012**

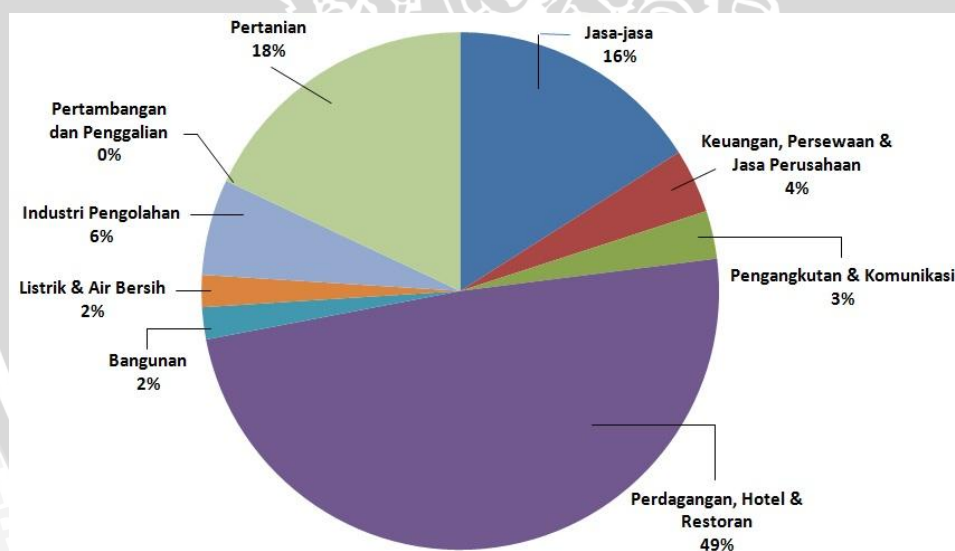
Jumlah Pengunjung	2010	2011	2012
Jatim Park (1&2)	899.725	777.834	804.679
Selecta	622.084	475.211	528.818
Kusuma Agro	60.352	63.474	16.230
Cangar	292.764	337.462	229.889
BNS	253.727	323.303	294.444

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2013

Dari data di atas bisa dilihat bahwa jumlah pengunjung yang datang ke Kota Batu terus mengalami peningkatan, hal ini dirasakan oleh hampir seluruh objek wisata yang ada di Kota Batu mulai dari Jatim Park 1 dan 2, selecta, kusuma agro, cangar dan BNS. Pengunjung terbanyak ditempati oleh objek wisata Jatim Park 1 dan 2, hal ini menunjukkan bahwa objek wisata buatan Jatim Park 2 merupakan destinasi favorit para wisatawan yang datang. Dengan menghadirkan konsep berbeda dengan objek wisata yang pernah ada, bukan tidak mungkin kalau wisatawan selalu menjadikan Jatim Park sebagai tujuan wisata utama ketika datang ke Kota Batu. Peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke Jatim Park ini diharapkan berimbas pula bagi objek wisata lainnya yang ada di Kota Batu. Sehingga keramaian pengunjung tidak hanya berpusat di lokasi wisata Jawa Timur Park saja, tapi juga di objek wisata lainnya.

Dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung ke Kota Batu, diharapkan bisa menggerakkan sektor perekonomian lain yang ada seperti perdagangan, hotel dan restoran yang hingga saat ini menjadi sub-sektor penopang pertumbuhan PDRB terbesar di Kota Batu. Secara ekonomis, keuntungan pendapatan pariwisata bisa dilihat melalui peningkatan penerimaan pendapatan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor tersebut dikatakan menerima dampak langsung dari adanya pembangunan pariwisata ini. Hotel sebagai penyedia kebutuhan akomodasi wisatawan dan restoran sebagai penyedia kebutuhan konsumsi wisatawan terus memperoleh tambahan pendapatan seiring dengan makin tingginya tingkat kunjungan wisata di Kota Batu. Di bawah ini bisa dilihat struktur perekonomian Kota Batu pada tahun 2012:

Gambar 1.1 : **Struktur Perekonomian Kota Batu Tahun 2012**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2013

Berdasarkan gambar di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2012 sektor Perdagangan, Hotel & Restoran merupakan penyumbang PDRB terbesar yaitu sebesar 49% bahkan dibandingkan dengan pertanian yang hanya sebesar 18% dari total PDRB Kota Batu. Diperkirakan bahwa peningkatan sektor perdagangan, hotel & restoran merupakan salah satu bentuk dampak dari

adanya pembangunan pariwisata yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Tentunya pengunjung yang berwisata di Batu akan tinggal disini dengan menggunakan jasa hotel dan membeli kebutuhan akomodasi di restoran sekitarnya.

Selain pengarunya terhadap perekonomian, pembangunan pariwisata juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Kota Batu terutama mereka yang bertempat tinggal di daerah sekitar lokasi wisata. Seperti pembangunan objek wisata Jawa Timur Park 2 yang ada di desa oro-oro ombo yang diharapkan dapat memberikan banyak keuntungan bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Jawa Timur Park 2 (JTP 2) merupakan jenis wisata theme park yang dibangun di tiga kawasan berbeda, yaitu Kelurahan Sisir, Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Temas. Pada awal berdirinya JTP 2 hanya diisi oleh Museum Satwa pada September 2010 yang menyajikan ±84 diorama satwa dari berbagai penjuru dunia, baik dalam dan luar negeri. Sejak awal dibukanya saja, jumlah pengunjung Museum Satwa mencapai 176.841 orang dan diperkirakan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain Museum Satwa kawasan wisata JTP 2 kini telah menghadirkan 2 objek wisata baru yaitu Batu Secret Zoo yang memiliki konsep seperti kebun binatang mini serta Eco Green Park yang memiliki konsep lebih modern.

Dengan adanya ketiga objek wisata dalam satu kawasan tersebut membuat Jawa Timur Park 2 mampu menarik banyak pengunjung dibandingkan objek wisata lainnya yang ada di Kota Batu. Selain itu, pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terlihat membawa banyak perubahan untuk daerah oro-oro ombo sendiri yaitu berupa pembukaan lahan, perbaikan jalan, penerangan dan juga mudahnya akses masuk ke daerah oro-oro ombo yang sebelumnya merupakan daerah terpencil. Selanjutnya peningkatan jumlah wisatawan diharapkan membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitarnya,

terutama manfaat secara ekonomis. Perkembangan yang bisa dilihat secara langsung adalah dengan makin banyaknya usaha-usaha baru yang muncul di sekitar lokasi wisata yang menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian warga didongkrak melalui perdagangan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini bisa dikatakan sebagai dampak langsung yang ditimbulkan dari adanya pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park di daerah tersebut. Dengan berbagai fenomena yang muncul di atas apakah benar bahwa usaha tersebut benar-benar melibatkan masyarakat lokal? Apakah berbagai perubahan yang terjadi termasuk peningkatan kegiatan ekonomi warga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat?

Sebagai industri yang besar, idealnya pertumbuhan pariwisata berpihak pada kesejahteraan ekonomi rakyat serta mampu memberikan manfaat bagi pelestarian budaya dan lingkungan secara merata dan berkelanjutan, tapi kenyataannya manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata masih kerap dibarengi oleh berbagai masalah sosial-budaya dan juga lingkungan. Apalagi sebelumnya pariwisata mengarah kepada pariwisata massal (*mass tourism*), yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif, seperti misalnya kerusakan lingkungan, pengalihan fungsi lahan, eksploitasi sosial budaya dan kriminalitas, yang bila dikalkulasikan biaya yang ditimbulkan lebih besar dari pada yang dihasilkan dari pariwisata.

Untuk menanggapi permasalahan tersebut, sebelumnya peneliti telah melihat dan mempelajari penelitian dengan tema yang sama yaitu “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya oleh Setyowibowo (2010)” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu langsung terjun ke masyarakat, melakukan pengamatan langsung dan wawancara. Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya. Disini terdapat beberapa perbedaan, antara lain: waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan waktu tahun 2010 sedangkan peneliti menggunakan waktu pada tahun 2012. Selain itu, lokasi dilakukannya penelitian juga berbeda, penelitian sebelumnya digunakan di wilayah Pasuruan sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Batu. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Peran Pembangunan Kawasan Wisata Jawa Timur Park II terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitarnya”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sektor pariwisata memiliki peluang dalam menunjang perekonomian dengan mempengaruhi banyak sektor yang berhubungan atau disebut *multiplier effect*, pariwisata seharusnya juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dimana objek wisata tersebut berkembang. Jawa Timur Park 2 merupakan kawasan wisata yang cukup luas dan mampu menarik banyak wisatawan setiap tahunnya, seharusnya bisa dijadikan sebagai lahan untuk masyarakat turut serta dalam pembangunan tersebut. Dari pemaparan tersebut penulis ingin merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi objek wisata?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan peneilitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park II terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi objek wisata.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Akademis, yaitu:
 - a) Untuk menambah wawasan mengenai perkembangan pariwisata di Kota Batu dan juga peran yang diberikan oleh pembangunan pariwisata terutama Jawa Timur Park 2 terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata.
 - b) Sebagai bahan pembelajaran dan juga literatur yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pariwisata di Kota Batu.
2. Manfaat Praktis, yaitu:
 - a) Memberikan informasi mengenai pertumbuhan pariwisata di Kota Batu beserta peranan objek wisata yang ada bagi masyarakat di Kota Batu terutama masyarakat yang tingal di sekitar lokasi wisata.

- b) Sebagai acuan dan pertimbangan pemerintah daerah Kota Batu untuk menentukan kebijakan atau langkah-langkah lanjutan dalam mengembangkan sektor pariwisatanya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Pembangunan Ekonomi

Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan pariwisata di suatu wilayah yang mendorong berbagai kegiatan ekonomi terpusat di dalamnya, secara perlahan dapat menyebabkan terjadinya aglomerasi di daerah perkotaan terutama pusat objek wisata itu sendiri. *Economic of agglomeration* sendiri adalah keuntungan yang diperoleh karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Berbagai fasilitas yang memperlancar kegiatan perusahaan misalnya jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat latihan dan tempat reklame.

Pusat perekonomian yang terbentuk inilah kemudian yang dinamakan sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*), dimana menurut Tarigan (2005) pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dalam dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar wilayah. Sementara secara

geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*).

Tarigan (2005) juga menyebutkan suatu wilayah dinamakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, yaitu adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Sehingga menciptakan suatu sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.
2. Ada efek pengganda (*multiplier effect*), yang muncul dari adanya banyak sektor yang saling berkaitan. Dengan demikian kemajuan sektor yang satu akan membawa pengaruh kenaikan terhadap sektor lain yang berhubungan.
3. Adanya konsentrasi geografis, yang bisa menciptakan efisiensi di antara sektor yang saling membutuhkan dan meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut.
4. Bersifat mendorong wilayah belakangnya, dimana terjalin hubungan yang harmonis antara kota dan wilayah belakang tempat penyedia bahan baku dan kebutuhan lain yang mendukung perkembangan kota.

Selanjutnya antara hubungannya dengan pusat pertumbuhan terdapat teori sektoral atau *sectoral theory of growth* dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark-Fisher (dalam Adisasmita: 2010) yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder). Alasan dari perubahan atau pergeseran sektor tersebut dapat dilihat dari sisi permintaan yaitu elastisitas pendapatan dari permintaan untuk barang dan jasa yang disuplai oleh industri

manufaktur dan industri jasa adalah lebih tinggi dibandingkan untuk produk-produk primer, maka pendapatan yang meningkat akan diikuti oleh perpindahan (realokasi) sumbernya dari sektor primer ke sektor manufaktur dan sektor jasa.

Dari sisi penawaran, yaitu realokasi sumberdaya tenaga kerja dan modal dilakukan sebagai akibat dari perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor tersebut. Kelompok sektor-sektor sekunder dan tersier menikmati kemajuan yang lebih besar dalam tingkat produktivitas, hal ini akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas yang lebih cepat, karena produktivitas yang lebih tinggi baik untuk tenaga kerja maupun untuk modal, dan penghasilan yang lebih tinggi tersebut memungkinkan untuk dilakukannya realokasi sumberdaya. Tentunya tingkat produktivitas yang tinggi tergantung dari inovasi dan kemajuan teknologi maupun skala ekonomi. Bila produktivitas lebih tinggi dalam industri, permintaan terhadap produk industri juga akan meningkat dengan cepat, maka terdapat kausalitas yaitu “produktivitas-harga rendah-permintaan bertambah luas”. Terjadinya perubahan atau pergeseran sektor dan pembagian kerja dipandang sebagai sumber dinamika pertumbuhan wilayah.

Suatu perluasan dari teori sektor adalah teori tahapan (*stages theory*), yang menjelaskan bahwa perkembangan wilayah adalah merupakan proses evolusioner internal dengan tahapan sebagai berikut (Adisasmita, 2010):

- a. Tahapan perekonomian sederhana swasembada dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan, sebagian besar penduduknya bekerja pada pertanian.
- b. Dengan kemajuan transportasi di wilayah yang bersangkutan akan mendorong perdagangan dan spesialisasi; industri-industri pedesaan masih bersifat sederhana (tradisional) untuk memenuhi kebutuhan para petani

- c. Dengan majunya perdagangan antar wilayah, maka wilayah yang maju akan memprioritaskan pada pengembangan sub sektor tanaman pangan selanjutnya diikuti oleh sub-sub sektor peternakan dan perikanan.
- d. Industri sekunder berkembang pada permulaan mengolah produk-produk primer kemudian diperluas dan makin lebih berspesialisasi.
- e. Pengembangan industri tersier (jasa) yang melayani permintaan dalam wilayah maupun di luar wilayah.

Selanjutnya ada juga teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunar Myrdal, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Pusat pertumbuhan tersebut juga mempunyai daya tarik terhadap tenaga terampil, modal, dan barang-barang dagangan yang menunjang pertumbuhan suatu lokasi. Demikian terus-menerus akan terjadi pertumbuhan yang makin lama makin pesat atau akan terjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi (*polarization of economic growth*). Teori polarisasi ekonomi Myrdal ini menggunakan konsep pusat-pinggiran (*coreperiphery*). Konsep pusat-pinggiran merugikan daerah pinggiran, sehingga perlu diatasi dengan membatasi migrasi (urbanisasi), mencegah keluarnya modal dari daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah pedesaan.

Adanya pusat pertumbuhan akan berpengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif terhadap perkembangan daerah sekitarnya disebut *spread effect*. Contohnya adalah terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, serta penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Sedangkan pengaruh negatifnya disebut *backwash effect*, contohnya adalah adanya ketimpangan wilayah, meningkatnya kriminalitas, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Selain itu, adanya pusat pertumbuhan diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*),

yaitu keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Apabila ada satu sektor yang karena permintaan dari luar wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat banyak sektor lain juga akan meningkat produksinya dan akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibanding dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut (sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur efek pengganda ini sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan wilayah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam, maka kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari wilayah belakangnya akan meningkat tajam pula.

2.2. Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini bisa dikatakan terus mengalami peningkatan seiring dengan makin bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, terus dilakukannya eksplorasi tempat tujuan wisata baru dan perbaikan tempat wisata yang ada membuat Indonesia memiliki banyak pilihan tujuan wisata yang semakin menarik minat wisatawan. Bahkan pada tahun 2013 lalu, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara selain migas dan batu bara. Dalam laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (2014), secara kumulatif jumlah kunjungan wisman pada Januari-April 2014, mencapai 2.947.684 wisman atau tumbuh dua digit atau sebesar 10,64% dibandingkan periode yang sama 2013 sebanyak 2.664.176 wisman. Pemerintah optimis bahwa ke depannya sektor pariwisata akan terus tumbuh dan mendongkrak sektor ekonomi lainnya.

Untuk mengikuti perkembangan pariwisata, pemerintah telah mengeluarkan peraturan/ regulasi terkait kepariwisataan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun

2009 yang menerangkan dan mengatur segala kegiatan pariwisata secara nasional. Semenjak dikeluarkannya peraturan perundangan No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada tanggal 16 Januari 2009 maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada undang-undang tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaannya. Prinsip penting yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan atas asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang semuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan kepariwisataan Indonesia adalah untuk:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c) Menghapus kemiskinan
- d) Mengatasi pengangguran
- e) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f) Memajukan kebudayaan
- g) Mengangkat citra bangsa
- h) Memupuk rasa cinta tanah air
- i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa

Dalam rangka mewujudkan tujuannya tersebut, dalam UU No.10 Tahun 2009 juga telah menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan yang sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesan yang sangat penting ditetapkan dalam undang-undang ini adalah kaitannya dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yaitu diberikannya kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk memberikan fasilitas dan regulasi penyelenggaraan kepariwisataan nasional, juga diberikan kewenangan untuk menyusun rencana induk pembangunan

kepariwisataan nasional dan menetapkan sebagai suatu peraturan pemerintah.

Sedangkan pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata serta melakukan promosi pariwisata yang ada di wilayahnya, juga diberikan kewenangan untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi dan produk wisata yang ada di daerahnya, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di daerahnya serta memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru juga memiliki kewenangan untuk menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota dan menetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota.

2.2.1. Definisi dan Jenis Pariwisata

Pariwisata memiliki definisi yang sangat luas, terlebih lagi dengan perkembangan pariwisata saat ini. Pariwisata bukan lagi sajian baru dan khusus untuk suatu wilayah, tapi sudah merupakan industri yang mulai berkembang dan mulai diminati oleh banyak orang. Dalam perkembangannya pariwisata menghasilkan industri-industri baru, lahan pekerjaan baru yang berkaitan dan menunjang sektor pariwisata itu sendiri. Seperti angkutan, hotel, perdagangan, konsumsi dan sektor jasa lainnya merupakan banyak sektor yang terkena imbas dari kepopuleran pariwisata. Seperti yang tercantum dalam UU No.10 Tahun 2009 pengertian tentang wisata diberikan batasan sebagai: “kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.

Sedangkan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian tentang wisata tadi, disebut sebagai wisatawan (*tourist*). Keseluruhan fenomena kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian wisata dan wisatawan diatas diberikan batasan pengertian atau didefinisikan dengan istilah pariwisata. Dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan tentang definisi pariwisata yaitu, berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Wahab (2003) menerangkan pengertian pariwisata seperti berikut ini:

“pariwisata merupakan salah satu bentuk industri baru yang bisa membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan, standar hidup masyarakatnya dengan cepat. Selain itu pariwisata akan mendongkrak sektor-sektor lainnya yang berkaitan, seperti transportasi, penginapan (yang merupakan industri klasik), sehingga nantinya akan menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Disebutkan pula pariwisata akan membawa pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan dan mempertahankan eksistensi pariwisata itu sendiri. Seperti perbaikan jalan, penerangan, penyediaan air, pelabuhan dan sebagainya yang seluruhnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.”

McIntish dan Gupta (dalam Yoeti: 2008) menyebutkan bahwa: pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, pengusaha, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta pengunjung lainnya. Dalam teori ini disebutkan perlunya peran serta dari berbagai komponen yang bersinergi untuk terus mengembangkan pariwisata di daerahnya. Selain pemerintah diperlukan juga tindakan aktif dari masyarakat sekitarnya terutama yang berada di sekitar lokasi wisata agar bisa mempertahankan keberlanjutan wisata itu sendiri. Selanjutnya interaksi antara ketiga komponen, wisatawan sebagai orang/kelompok yang melakukan kegiatan wisata didalam lingkup kegiatan

pariwisata kemudian didefinisikan sebagai kepariwisataan yang dalam UU No.10 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Dari berbagai jenis pariwisata yang ada dan ditawarkan di berbagai daerah di Indonesia, jenis-jenis wisata pada umumnya adalah: wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata komersial, wisata industri, wisata politik, wisata konvensi, wisata sosial, wisata cagar alam, serta pariwisata regional. Selain itu, jenis pariwisata masih dibagi lagi berdasarkan letak geografisnya, berdasarkan pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti wisata, berdasarkan maksud dari wisata itu sendiri, berdasarkan alat pengangkutan yang dipakai, berdasarkan umur peserta wisata dan sebagainya.

Pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata tidak begitu saja berjalan dan muncul dengan sendirinya. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti tambahan dana, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya baik alam maupun manusia. Selain stimulus dari pemerintah diperlukan juga peranan masyarakat yang juga turut mendukung pertumbuhan pariwisata, salah satunya keramahan, penciptaan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Sehingga dalam perkembangannya pariwisata akan tetap tumbuh dan bahkan lebih baik. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan di sektor pariwisata salah satunya adalah dengan tersedianya sumber daya alam yang bisa dikelola dan dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata. Menurut Yoeti (2008) beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pariwisata antara lain:

- a. *Three "T" Revolution*, yang terdiri dari: (1) *Transportation Technology*, merupakan bentuk perkembangan teknologi transportasi saat ini yang semakin maju. Dengan pelayanan transportasi yang bagus disertai fasilitas yang lengkap, sehingga tercipta kenyamanan bagi para wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata; (2) *Telecommunication*, dengan munculnya teknologi *one touch system* yang memberikan kemudahan bagi calon wisatawan dalam memperoleh segala informasi mengenai daerah tujuan wisata yang diinginkannya. Selain sebagai media informasi, *one touch system* ini menjadi ajang promosi bagi negara-negara yang memiliki daerah tujuan wisata; (3) *Tourism & Travel*, dengan adanya kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi di atas menciptakan *mass tourism* yang mampu menggerakkan orang-orang ke dalam ruang lingkup global untuk melakukan perjalanan wisata.
- b. *Hybrid*, pada nantinya pariwisata akan mengalami perkembangan melalui berbagai jalan salah satunya adalah pola perjalanan wisata akan mengalami perkembangan dengan sendirinya seperti perjalanan wisata yang diadakan bersama keluarga akan memperpanjang waktu liburannya.
- c. *Leisure Time*, atau waktu senggang yang dimiliki seseorang yang akan mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dalam mengisi waktu luangnya tersebut. Semakin banyak waktu senggang yang dimiliki mungkin saja orang tersebut akan menggunakan waktunya untuk berlibur.
- d. *Discretionary Income*, sebagai akibat meningkatnya jumlah uang yang kalau dibelanjakan tidak akan mengganggu keperluan keluarga sehari-hari.
- e. *Paid Vacation*, atau dana tunjangan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi berupa uang cuti kepada karyawannya yang digunakan untuk keperluan berlibur.

- f. *Status and Prestige Motivation*, motivasi ini bersifat sangat emosional karena mendorong seseorang dalam menjaga prestisenya. Jadi perjalanan wisata yang dilakukan hanya karena termotivasi untuk menjaga status dan prestise saja.

2.3. Pariwisata sebagai Industri

Industri pariwisata menurut UU No.10 Tahun 2009 adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pada dasarnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah/wilayah tujuan wisata baik yang terjadi pada kunjungan wisatawan domestik maupun pada kunjungan wisatawan internasional akan membawa dampak pada tumbuhnya kegiatan-kegiatan usaha terkait. Sinergi keterkaitan usaha dan kegiatan atau aktivitas kepariwisataan tadi akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem interaksi diantara komponen-komponennya yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan suatu kegiatan yang bersifat menyatu dan menyeluruh. Dari seluruh kegiatan yang tercipta akibat adanya kegiatan kepariwisataan tersebut ada yang bersifat hubungan langsung (*direct impact*) misalnya kegiatan transportasi, akomodasi, restoran dan sebagainya namun juga ada keterkaitan kegiatan dan usaha yang bersifat tidak langsung (*induced impact*) misalnya kegiatan makan dan minum wisatawan yang menyebabkan meningkatnya pembelian hasil pertanian, perkebunan dan peternakan lokal.

Disamping hubungan langsung dan tidak langsung tadi rangkaian kegiatan dalam kepariwisataan sifatnya saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan sehingga membentuk suatu kesisteman yang harus diperhatikan secara utuh dan menyeluruh. Sehingga pembangunan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan dengan mengembangkan objek wisatanya saja tapi harus

memperhatikan aspek lain seperti aksesibilitas, transportasi dan fasilitas pendukung lainnya yang harus dikembangkan dalam suatu perencanaan sistem yang terpadu. Pendit (dalam Sunaryo: 2013) juga menyebutkan adanya pola keterkaitan antara aktivitas kepariwisataan dengan kegiatan-kegiatan terkait yang lainnya:

“...kepariwisataan dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan seperti perbaikan pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar...”.

Yang dimaksud pariwisata sebagai industri disini adalah rangkaian proses aktivitas atau kegiatan produksi yang menghasilkan nilai tambah (*value added*) dan produknya bisa bersifat tidak konkret atau kasat mata (*intangible*). Pemahaman inilah yang akan digunakan untuk menggambarkan peran strategis industri kepariwisataan dalam pembangunan serta penjelasan karakter-karakter positifnya yang bersifat spesifik untuk membedakanya dengan jenis-jenis industri yang lain.

Menurut data statistik di Indonesia pada tahun 2013 sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa negara ke-4 setelah migas, batu bara, minyak kelapa sawit dan olahan yaitu sebesar Rp. 347 Triliun, atau 23% dari pendapatan negara dalam APBN-Perubahan 2013. Industri kepariwisataan telah terbukti memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional terutama perannya sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa diluar minyak dan gas (non migas). Disamping manfaat ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas, kepariwisataan juga berpotensi untuk menjadi instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya yang berdomisili dan terkait dengan kepariwisataan di sekitar lokasi wisata.

Menurut Sunaryo (2013) ada beberapa karakteristik unggul dari industri kepariwisataan yang menyebabkan industri ini mampu berperan sebagai lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, di antaranya adalah:

1. Sektor kepariwisataan adalah sebuah industri yang mempunyai keterkaitan rantai nilai (*multiplier effect*) yang sangat panjang dan mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro termasuk kegiatan home industry.
2. Usaha kepariwisataan mampu menyerap banyak sumberdaya setempat (*local resources based*) dan utamanya berbahan baku yang relatif tidak pernah habis atau terbaharui (*renewable resources*).
3. Dalam industri kepariwisataan tidak ada *over supply* karena mempunyai karakteristik produk yang khas, dan relatif tidak terpengaruh oleh situasi resesi/krisis ekonomi pada suatu negara.

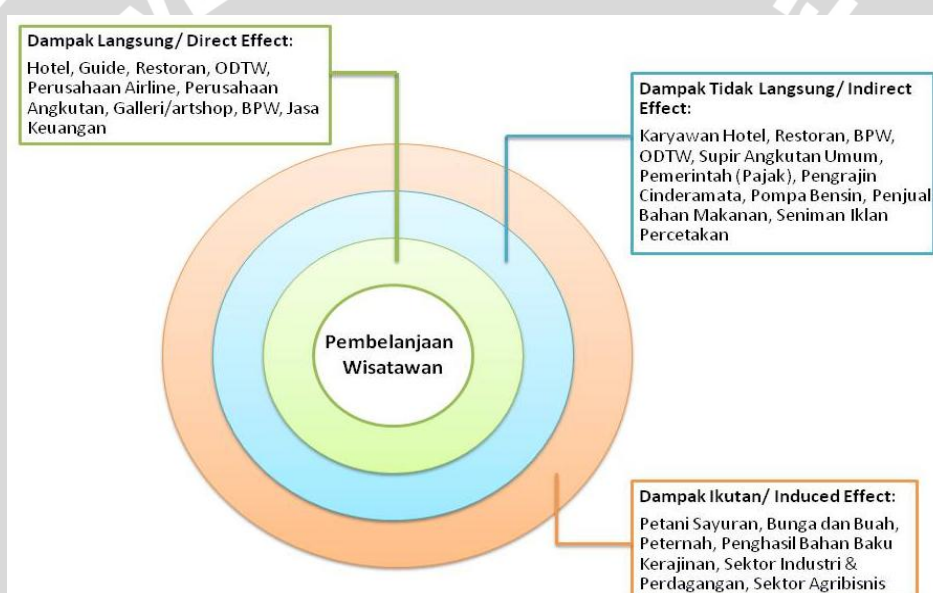
Selain karakter unggul seperti yang dikemukakan diatas, Sunaryo (2013) juga menyebutkan bahwa industri kepariwisataan juga memiliki karakter spesifik yang sangat strategis sebagai instrumen untuk pemerataan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah terpencil maupun pedesaan. Beberapa karakter tersebut, antara lain:

1. *In-situ* yang diartikan bahwa untuk dapat mengkonsumsi suatu produk kepariwisataan yang ditawarkan oleh suatu destinasi, industri ini mengharuskan konsumennya (*wisatawan*) untuk berkunjung mendatangi lokasi dimana produk pariwisata itu berada. Konsekuensi logis dari tata industri dan perdagangan seperti ini adalah nilai tambah yang berasal dari pengeluaran wisatawan untuk transportasi, akomodasi, makan dan minum, jasa pelayanan dsb akan menetes langsung ke masyarakat dan wilayah dimana destinasi itu berada. Sehingga kepariwisataan dapat

menjadi katalis dan instrumen pemerataan pembangunan di seluruh wilayah terbelakang baik di kawasan perkotaan dan pedesaan.

2. Keterkaitan usaha yang panjang yang dimaksud adalah kegiatan industri kepariwisataan yang mampu mengungkit dan menggerakkan sektor-sektor usaha dan kegiatan terkait dalam berbagai skala usaha. Dengan demikian industri kepariwisataan secara teoritik akan memiliki kemampuan yang sangat besar dalam menciptakan dampak ekonomi *multiplier effect* bagi daerah dan masyarakat yang terkait.

Gambar 2.1 Dampak Pembangunan Pariwisata



Sumber: Sunaryo, 2013

Dari gambar diatas, maka pernyataan hipotesis tentang posisi dan peran pariwisata sebagai alat yang efektif bagi pengembangan wilayah pemerataan pembangunan, penggerak usaha terkait, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan semakin jelas dan dapat dipahami secara logis. Namun demikian manakala industri kepariwisataan tidak dikelola dengan baik, kepariwisataan dapat menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan, serta sosial budaya yang ada di masyarakat. Sunaryo (2013) mengatakan bahwa

industri pariwisata dapat dipandang sebagai sebuah sub-sistem dari sistem pariwisata secara keseluruhan.

Pariwisata dikatakan industri karena melibatkan banyak sektor yang mendukung perkembangan pariwisata itu sendiri, Leiper (dalam Sunaryo: 2013) kemudian mengklasifikasikan tujuh sektor utama dalam industri pariwisata yaitu:

1. Sektor Pemasaran (*the marketing sector*), yang mencakup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata. Umumnya sektor pemasaran ini berada di *traveller generating region* dimana kegiatan promosi, *advertising*, publikasi dan penjualan produk/ paket wisata dilakukan. *Traveller generating region* juga merupakan tempat calon wisatawan memutuskan dan merencanakan perjalanan wisatanya. Hal inilah yang menyebabkan pasar industri pariwisata sebagian besar bersumber dari *traveller generating region*.
2. Sektor Perhubungan (*the carrier sector*), mencakup semua bentuk dan macam transportasi publik khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisatawan (*traveller generating region*) dengan tempat tujuan wisatawan (*tourist destination region*).
3. Sektor Akomodasi (*the accomodation sector*), sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu seperti penyediaan makanan dan minuman. Sektor ini umumnya berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit.
4. Sektor Daya Tarik/ Atraksi Wisata (*the attraction sector*), sektor ini terfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi utamanya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga terletak pada daerah transit. Jika suatu daerah tujuan wisata tidak memiliki sumber daya/ daya tarik wisata alam yang menarik biasanya akan dikompensasikan dengan memaksimalkan daya

tarik atraksi wisata lain. Usaha mengindustrialisasikan suatu objek atau even sering mengakibatkan daya tarik/ atraksi wisata yang bersifat artificial attraction.

5. Sektor Tour Operator (*the tour operator sector*), mencakup perusahaan penyelenggara dan penyedia paket wisata. Sektor ini umumnya terkonsentrasi pada daerah tujuan wisata (*tourist destination region*) dan sepanjang rute transit awal wisatawan menuju daerah tujuan wisata.
6. Sektor Pendukung/Rupa-Rupa (*the miscellaneous sector*), yang mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di negara tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun di negara/ tempat tujuan wisata. Sektor ini merupakan sektor yang memperlancar pergerakan sistem pariwisata untuk menjangkau beragam batas geografis.
7. Sektor Pengkoordinasian Regulator (*the coordinating sector*), mencakup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik di tingkat lokal, regional maupun internasional. Sektor ini biasanya menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industri pariwisata.

Dikatakan sebuah industri karena sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dan melengkapi segala kebutuhannya secara perorangan. Terutama seperti sekarang ini, pariwisata membutuhkan dukungan dari banyak sektor untuk mendukung eksistensinya. Hotel dan restoran, komunikasi, angkutan merupakan serangkaian sub-sektor yang menunjang pertumbuhan sektor pariwisata di suatu daerah. Pada akhirnya pariwisata kini bisa dikatakan sebagai suatu “*industri*” akibat dari adanya serangkaian produk (usaha) yang muncul untuk mendukung sektor pariwisata, yang kesemuanya turut berkontribusi dalam pertumbuhan

ekonomi. Industri pariwisata menurut UU No.10 Tahun 2009 adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Sementara itu Hadinoto (dalam Sunaryo: 2013) menerangkan bahwa industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian. Sedangkan usaha pariwisata didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata, dan usaha lain yang terkait bidang tersebut. Kemudian jenis usaha pariwisata dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, antara lain:

- a. Daya tarik wisata
- b. Kawasan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata
- d. Jasa perjalanan wisata
- e. Jenis makanan dan minuman
- f. Penyediaan akomodasi
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
- i. Jasa informasi pariwisata
- j. Wisata tirta, dan
- k. Spa

Usaha tersebut tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja yang selanjutnya memberikan tambahan bagi perekonomian di sekitarnya. Lebih lanjut

sektor yang terkait dan terlibat dalam kepariwisataan adalah sektor kehutanan, kelautan, pertanian dan perkebunan, industri dan perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, kimpraswil, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, imigrasi dan hubungan luar negeri. Dengan memaksimalkan kerjasama antar sektor tersebut maka dapat disiapkan kerangka pengembangan terpadu yang akan memberikan nilai manfaat yang besar dalam jangka panjang, baik dalam hal penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun konservasi lingkungan dan sumber daya alam.

2.3.1. Pariwisata dan Penyerapan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan pariwisata yang didasarkan dengan prinsip memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan membuat sektor pariwisata mampu memberikan pengaruh ke sektor lainnya, mulai dari sektor perdagangan kecil (toko kelontong) sampai usaha *tour and travel* yang melibatkan banyak tenaga kerja, baik dari masyarakat hingga kalangan internasional.

Sammeng (2001) mengatakan bahwa industri pariwisata kini telah masuk dalam kategori padat karya sehingga banyak pemerintah daerah yang mengadakan pembangunan pariwisata di daerahnya karena terbukti membuka lapangan kerja baru yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat terutama di sekitar lokasi wisata. Selain dari kemampuan menciptakan lapangan kerja yang (cukup) besar, industri pariwisata juga dapat menyerap tenaga kerja dari semua level kompetensi, mulai dari tenaga tak berketrampilan (*unskilled*) sampai dengan setengah terampil dan terampil, bahkan sampai dengan tingkat eksekutif. Dalam kaitannya inilah, kemudian beberapa negara berkembang memilih untuk

membangun sektor wisatanya di daerah-daerah yang tingkat penganggurannya tinggi.

Sammeng (2001) kemudian menerangkan lapangan kerja yang tercipta oleh industri pariwisata dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:

- (a.) Lapangan Kerja Langsung, adalah pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pada jajaran industri pariwisata, misalnya: akomodasi dan *catering, tours & travel*, daya tarik dan fasilitas bisnis pariwisata. Pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa saja yang menyangkut lini garis depan, yakni petugas yang berhadapan langsung dengan wisatawan atau pekerjaan di "*belakang layar*", misalnya: jurum masak, petugas pembersih atau tugas-tugas lain yang tidak berhadapan langsung dengan wisatawan. Jadi yang tergolong lapangan kerja langsung (pariwisata) adalah semua pekerjaan yang tersedia untuk melayani wisatawan dalam perjalanan, misalnya: penyediaan transport wisata, pelayanan tempat menginap dan makan minum serta penyiapan sesuatu untuk dilihat atau dikerjakan oleh wisatawan (dayatarik wisata).
- (b.) Lapangan Kerja Tidak Langsung, adalah pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pada pabrik, toko dan usaha-usaha lain yang diperlukan oleh pengusaha dan organisasi-organisasi pariwisata yang melayani langsung wisatawan. Lapangan kerja tidak langsung mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mulai sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sampai dengan sektor industri manufaktur dan industri jasa.
- (c.) Lapangan Kerja *Induced*, adalah lapangan kerja yang tercipta akibat dari pengeluaran orang-orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung pada industri pariwisata.

Seiring dengan kemampuan sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, akhirnya membuat pernyataan Yoeti mungkin saja benar, bahwa pariwisata merupakan katalisator pembangunan (*agent of*

development). Marpaung dan Bahar (dalam Sammeng: 2001) menerangkan bagaimana pariwisata akan memberikan peluang bagi tenaga kerja dan peran pariwisata dalam neraca nasional, yaitu:

1. Pembelanjaan konsumen atas transportasi, akomodasi dan jasa boga/penjualan eceran, rekreasi dan jasa-jasa perjalanan terkait serta oleh warga negara sendiri yang melakukan perjalanan.
2. Investasi modal yang dilakukan kalangan usaha, pemerintah dan perorangan warga negara sendiri dalam industri pariwisata bentuk prasarana, gedung serta peralatan.
3. Pembelanjaan pemerintah (operasional) yang memungkinkan terjadinya perjalanan wisata.
4. Perdagangan luar negeri (*ekspor netto*) akibat pembelanjaan wisatawan bukan warga negara sendiri (*non-resident*) atas jasa serta barang dan penjualan persediaan bagi perjalanan serta wisata.
5. Pembelanjaan dunia usaha, perjalanan yang dilakukan kalangan dunia usaha serta pemerintah dalam menunjang kegiatan sehari-hari.

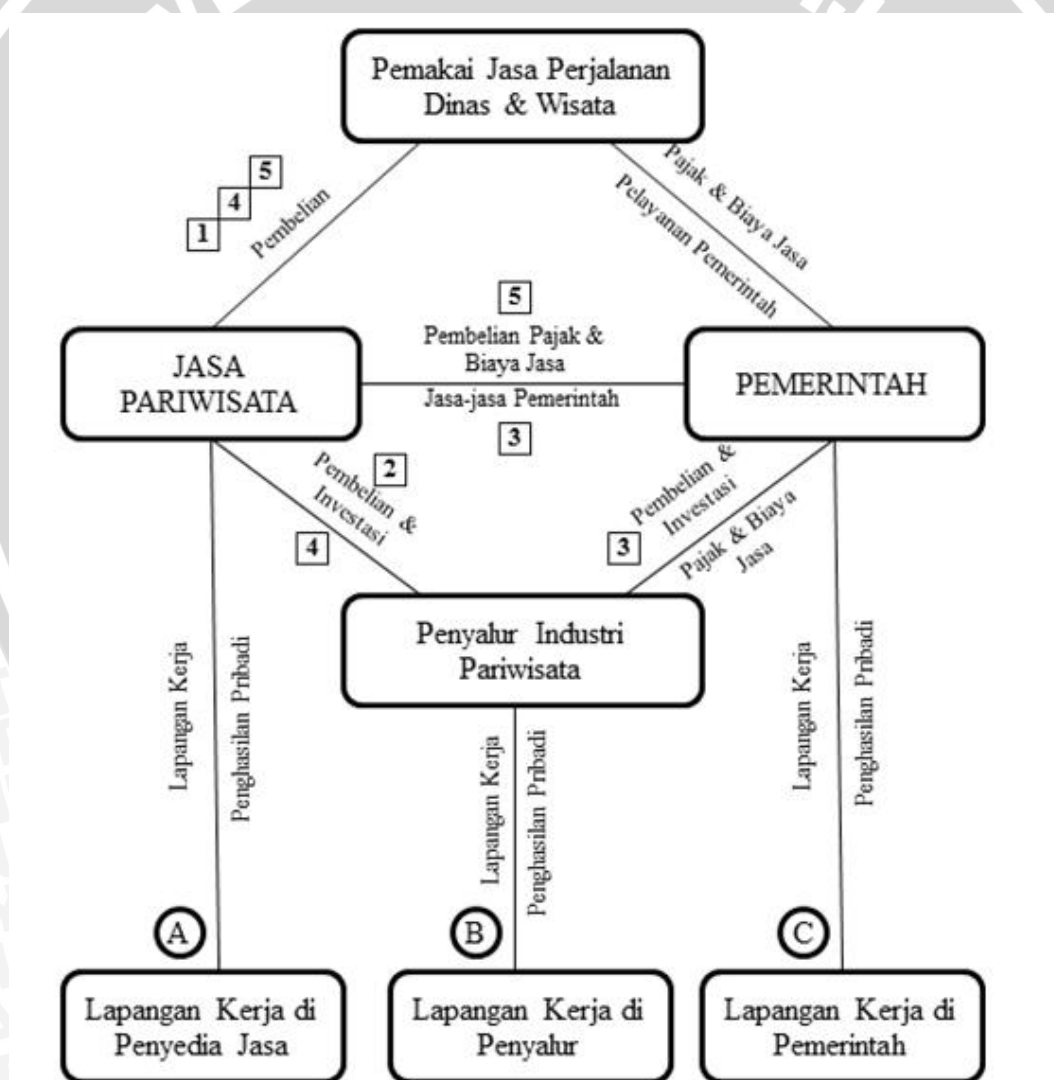
Menurut riset *World Travel and Tourism Council* atau WTCC (1999) pihak-pihak yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata antara lain:

- a. Para pihak yang terkait dengan penyediaan jasa-jasa perjalanan dan wisata kepada konsumen-personal *travelers*, *business travelers*, *government travelers*-seperti pilot perusahaan penerbangan, pekerja hotel, agen penyewaan kendaraan bermotor, operator perjalanan wisata dan pedagang eceran.
- b. Para pihak yang terkait dengan penyediaan jasa konstruksi, manufaktur, distribusi dan jasa-jasa usaha kepada para pelaku industri pariwisata.

- c. Para pihak yang terkait dengan penyediaan jasa pariwisata oleh pemerintah seperti pemasaran, agen-agen transportasi, jasa pertamanan, petugas bandar udara, petugas penyelamat pantai dan petugas keamanan.

Dari keterangan poin-poin di atas maka mekanisme penciptaan kesempatan kerja sektor pariwisata, adalah seperti di bawah ini

Gambar 2.2 Mekanisme Penciptaan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata



Sumber: Sammeng (2001)

Dari gambar diatas ditunjukkan bahwa pariwisata membutuhkan banyak tenaga kerja dalam menunjang keberlanjutannya. Lapangan kerja dan tambahan keuntungan bisa menjadi sangat tinggi dihasilkan dari sektor ini.

Pariwisata sudah tentu memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian, terutama daerah yang ramai dikunjungi wisatawan. Melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, sektor pariwisata akan mendongkrak perekonomian daerah wisata tersebut. Pembangunan pariwisata menurut UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, meliputi:

- a. Industri pariwisata
- b. Destinasi pariwisata
- c. Pemasaran
- d. Kelembagaan kepariwisataan

Dari berbagai pilihan pembangunan pariwisata di atas tentunya memberikan banyak peluang bagi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha/investor untuk memanfaatkannya dengan baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian. Kontribusi pertumbuhan sektor pariwisata sendiri bisa dilihat secara langsung dengan terbukanya lapangan kerja baru yang akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja dan akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata tersebut.

Selain itu apabila jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan maka hotel, restoran, jasa pengangkutan, perdagangan serta beberapa sektor lainnya juga turut merasakan imbasnya. Untuk hotel misalnya jumlah tamu yang menginap akan bertambah dan pendapatan hotel juga akan meningkat. Melalui penerapan pajak PPn 10% yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk hotel dan restoran akan memberikan bagian tambahan tersendiri bagi pemerintah daerah tersebut. Demikian juga dengan sektor lain yang menunjang tumbuhnya sektor pariwisata di suatu daerah

2.4. Pariwisata serta Peranannya dalam Mendorong Perekonomian Daerah

Dalam peranannya dalam mendorong perekonomian daerah, pertumbuhan pariwisata sangat bergantung pada manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yaitu *stakeholder* baik dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang ada di daerah. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang terpadu antara *stakeholders* tersebut. Sunaryo (2013) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait, yang berperan untuk mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya.
2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan, yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi LSM, kelompok sukarelawan, Pemerintah Daerah, Asosiasi Industri Wisata, Asosiasi Bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Kemitraan Kepemilikan Lokal, dimana pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Usaha fasilitas penunjang

kepariwisataan seperti hotel, restoran, cinderamata, transportasi wisata dsb seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat melalui proses kemitraan yang sinergis. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kerjasama kemitraan kepemilikan usaha. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat setempat harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal dari berbagai usaha tersebut.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan pembangunan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria dan standart internasional yang sudah baku.
5. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat, agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan baik. Misalnya kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen sampai pada pemasaran.
6. Daya Dukung Lingkungan, juga harus dipertimbangkan dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. Program dan kegiatan serta pengoperasiannya seharusnya dipantau dan dievaluasi secara reguler

sehingga dapat dilakukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan secara dini. Skala dan tipe fasilitas wisata harus diupayakan tidak melampaui batas ambang penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan Evaluasi Program, yang mencakup kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Pedoman atau alat-alat bantu pemantauan dan evaluasi dampak yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala internasional, nasional, regional dan lokal.
8. Akuntabilitas Lingkungan, perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat setempat yang tercermin dengan jelas dalam kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air dan udara harus menjamin akuntabilitas kinerja yang tinggi serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.
9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait, pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan professional. Pelatihan sebaiknya diarahkan pada topik-topik pelatihan tentang kepariwisataan berlanjut, manajemen perhotelan secara berlanjut serta

topik-topik lain yang relevan dengan wawasan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan yang holistik.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan, untuk penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan.

Sejak dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, pengelolaan kepariwisataan sudah seharusnya menjadi kewenangan penuh bagi pemerintah daerah tempat lokasi wisata berada. Dengan demikian diharapkan pemerintah lebih responsif dan selalu inovatif dalam menanggapi perubahan serta pengembangan pariwisata di daerah. Salah satunya pemerintah harus mempunyai kemampuan untuk mewadahi proses politik dan pengambilan keputusan mengenai norma dan kebijakan yang selanjutnya bisa diimplementasikan dalam bentuk regulasi.

Sementara itu Yoeti (2008) juga menerangkan peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan pergerakan di daerah atau regional. Dengan adanya pembangunan di sektor pariwisata, akan membawa dampak tersendiri bagi kegiatan perekonomian di daerah antara lain:

- a. Mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah-daerah urban
- b. Meningkatkan produk hasil kesenian dan kebudayaan pada umumnya
- c. Memperluas pasar produk industri kecil ke dunia internasional
- d. Memperkuat posisi neraca pembayaran, dan
- e. Memberikan multiplier effect pada daerah yang menerima kunjungan wisatawan (*tourist receiving countries*) melalui investasi, perdagangan dan sebagainya

Sedangkan menurut Wahab (dalam Yoeti: 2008) pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya:

- a. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya sarana prasarana demi pengembangan pariwisata, sehingga memungkinkan orang-orang melakukan aktivitas ekonominya dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam satu wilayah negara tertentu maupun dalam kawasan internasional sekalipun
- b. Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata
- c. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan penunjang industri lainnya seperti hotel dan restoran
- d. Meningkatkan permintaan terhadap *handicrafts*, *souvenir goods*, *art painting* dsb
- e. Memperluas pemasaran barang lokal sehingga lebih dikenal oleh dunia internasional termasuk makanan dan minuman
- f. Meningkatkan perolehan devisa negara, sehingga dapat mengurangi beban defisit neraca pembayaran
- g. Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah dan peningkatan pendapatan nasional
- h. Membantu membangun daerah-daerah terpencil yang selama ini tidak tersentuh pembangunan
- i. Mempercepat perputaran perekonomian negara-negara penerima kunjungan wisatawan (*tourist receiving countries*)
- j. Dampak penggandaan yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan sehingga memberi dampak positif bagi daerah tujuan wisata (DTW) yang dikunjungi wisatawan

2.4.1. Pariwisata Berbasis Masyarakat

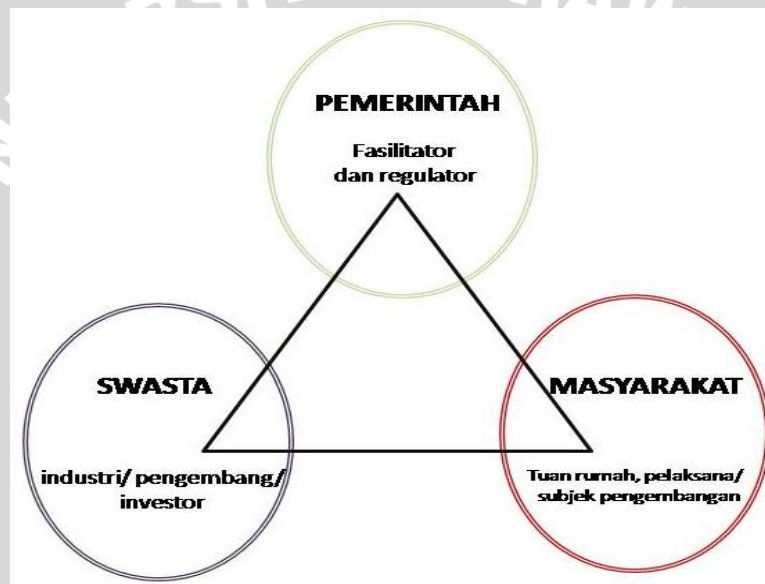
Dalam mengoptimalisasikan manfaat pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar objek wisata sebagaimana tercermin dalam salah satu prinsip pembangunan kepariwisataan yang berlanjut. Dalam pembangunan kepariwisataan dikenal strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Strategi tersebut dikenal dengan istilah *Community-Based Tourism Development (CBT)*.

Konstruksi CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Diterangkan bahwa community based tourism (CBT) yang diakses melalui www.tourismconcern.org.uk merupakan usaha ekowisata yang dimiliki, dikelola dan diawasi oleh masyarakat setempat. Dimana masyarakat berperan aktif dalam pengembangan ekowisata mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ekowisata sebanyak mungkin dinikmati oleh masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini masyarakat memiliki wewenang yang memadai untuk mengendalikan kegiatan ekowisata.

Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata dengan melibatkan mereka dalam kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam proses pembangunan kepariwisataan kedepan. Dalam mewujudkan model pembangunan yang seperti itu, diperlukan sinergi antara stakeholders yang berkaitan langsung dengan

kepariwisataan, yaitu antara pihak Pemerintah-Industri-Masyarakat pada tata kelola kepariwisataan yang baik (*good tourism governance*).

Gambar 2.3 **Good Tourism Governance** dalam Kepariwisata



Sumber: Sunaryo (2013)

Secara teoritis, Murphy (dalam Sunaryo: 2013) menyebutkan bahwa pada hakekatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai "kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat". Murphy juga memberikan beberapa batasan pengertian tentang CBT, antara lain:

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan yang juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Hausler (dalam Sunaryo: 2013) mengatakan bahwa CBT pada hakekatnya merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung dalam industri pariwisata maupun tidak, dalam pemberian akses pada manajemen dan sistem pembangunan kepariwisataan yang berujung pada pemberdayaan politis melalui kehidupan yang lebih demokratis, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan kepariwisataan secara lebih adil bagi masyarakat lokal. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat, yaitu:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan,
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan, dan
3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Suansri (dalam Sunaryo: 2013) menerangkan bahwa dalam perkembangan CBT harus meliputi 5 dimensi pengembangan yang merupakan aspek utama pembangunan kepariwisataan sebagai berikut:

1. *Dimensi Ekonomi*, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, berkembangnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata;
2. *Dimensi Sosial*, dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran gender yang adil antara laki-lai dan perempuan, generasi muda dan tua, serta memperkuat organisasi komunitas;
3. *Dimensi Budaya*, dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati nilai budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, berkembangnya nilai budaya pembangunan yang melekat erat dalam kebudayaan setempat;
4. *Dimensi Lingkungan*, dengan indikator terjaganya daya dukung lingkungan, adanya sistem pengelolaan sampah yang baik, meningkatnya kepedulian akan perlunya konservasi dan preservasi lingkungan;
5. *Dimensi Politik*, dengan indikator meningkatnya partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan adanya jaminan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Menurut Drake dan Paula (dalam Sunaryo: 2013), ada beberapa cara atau strategi yang bisa dikembangkan dalam pendekatan perencanaan yang partisipatif dilakukan dengan cara:

1. Mengkonsultasikan atau mendiskusikan setiap proyek pengembangan kepariwisataan kepada masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam manajemen proyek kepariwisataan, dengan harapan akan dapat meningkatkan efisiensi setiap proyek kepariwisataan yang ada.
2. Memastikan bahwa tujuan proyek bisa menjamin pencapaian manfaat dan keuntungan yang diterima oleh kelompok/masyarakat lokal, sehingga

mereka akan berperanaktif mendukung proyek. Sehingga dapat diharapkan efektivitas proyek akan jauh lebih meningkat dengan mengikutsertakan masyarakat lokal tersebut.

3. Selalu mengembangkan upaya *capacity building* bagi kelompok masyarakat terkait agar mereka memahami peranannya dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan.
4. Selalu mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal khususnya dengan cara memberikan otoritas kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya termasuk keputusan dalam penggunaan sumber daya lokal.
5. Pembagian keuntungan kepariwisataan yang lebih adil kepada penerima manfaat setempat (*local beneficiaries*), seperti pada aspek: pengupahan tenaga kerja, pembagian keuntungan modal, biaya operasional dan perawatan proyek, dan/atau kewenangan monitoring dan evaluasi proyek.

2.4.2. Peran Pemerintah Daerah

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata menurut UN-WTO (dalam Sunaryo: 2013) antara lain:

1. Membangun kerangka operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata.
2. Menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.
3. Menyediakan dan membangun infrastruktur transportasi darat, laut dan udara dengan kelengkapan prasarana komunikasinya.
4. Membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang professional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

5. Menerjemahkan kebijakan pariwisata yang disusun kedalam rencana kongkret yang mungkin termasuk di dalamnya: (a) evaluasi kekayaan asset pariwisata, alam dan budaya serta mekanisme perlindungan dan pelestariannya; (b) identifikasi dan kategorisasi produk pariwisata yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif; (c) menentukan persyaratan dan ketentuan penyediaan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan yang akan berdampak pada keragaan (*performance*) pariwisata, dan; (d) mengelaborasi program untuk pembiayaan dalam aktivitas pariwisata baik untuk sektor publik maupun swasta.

Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis. Pemerintah tentu harus memperhatikan dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Dari sisi lain, pebisnis yang lebih terfokus dan berorientasi pada keuntungan tentu tidak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu dengan mencapai keuntungan tetapi harus menyesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah setempat. Di bawah ini merupakan kewajiban dan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan pariwisata di daerahnya

Sunaryo (2013)

Tabel 2.1 Kewajiban dan Peran Pemerintah Daerah

<p>Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisis ekonomi untuk kondisi sekarang dan perkiraan masa depan dari pengembangan pariwisata. ▪ Buat strategi untuk meningkatkan keuntungan ekonomi dan kegiatan pariwisata. ▪ Pastikan manajemen finansial bekerja dengan baik sehingga pengusaha lokal dapat memperoleh
----------------	--

	keuntungan, pengunjung membayar kewajibannya, penduduk lokal mendapat keuntungan secara adil.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi dampak pariwisata terhadap lingkungan. ▪ Buat sinergi antara pembangunan dan pengembangan pariwisata dengan usaha konservasi.
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdayakan komunitas lokal sebagai pemilik dan pemangku kepentingan pariwisata dengan menerapkan manajemen yang konsisten dengan nilai lokal.
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan promosi dan degradasi, jabatan serta kewirausahaan di bidang pariwisata. ▪ Sediakan pendidikan dan latihan yang cukup untuk penyelenggara pariwisata termasuk sertifikasi dan program pelatihan serta transfer teknologi dan skill.

Sumber: Sunaryo (2013)

Pemerintah terutama Pemerintah Daerah merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam mendukung dan menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. Sebagai lembaga eksekutif, pemerintah daerah harus mampu menyiapkan program kerja dan juga regulasi yang mendukung kelancaran pembangunan sektor wisata baik untuk investor/swasta/industri namun tidak melupakan kesejahteraan masyarakat lokal, mempertahankan lingkungan dan menjaga eksistensi budaya yang ada.

Dalam hal ini pemerintah juga harus bertindak aktif sebagai *controller* untuk mengawasi jalannya pembangunan pariwisata di daerah. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dimana:

- a. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan

kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

- b. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bersama-sama berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Indonesia terutama di daerah. Pariwisata yang juga menyangkut kepentingan segala lapisan masyarakat merupakan sektor yang strategis sehingga pariwisata tidak bisa hanya ditangani oleh instansi saja dalam hubungan antara pusat dan daerah pariwisata harus ditangani oleh pemerintah sebagai satu kesatuan utuh dan terpadu. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besar adalah dengan menyediakan infrastruktur, memperluas segala bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur dan sarana pariwisata yang menuju ke dan terdapat di daerah-daerah tersebut. Namun dalam pengembangannya pemerintah juga harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial, penggunaan tanah, perlindungan terhadap lingkungan sosial dan alam serta pada pelestarian tradisi dan kebudayaan. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata juga telah disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2009, yaitu:

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat adanya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya bisa dilihat melalui salah satu penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu langsung terjun ke masyarakat, melakukan pengamatan langsung dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan obyek wisata ranu grati mulai mendapat perhatian dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2003. Hal ini ditunjukkan dengan pengembangan pembangunan berbagai fasilitas yang ditujukan sebagai penarik minat pengunjung. Dengan peningkatan jumlah pengunjung, pemerintah mengharapkan penduduk sekitar dapat berperan serta untuk aktif dan mendapat kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan pengunjung. Tetapi setelah dilakukan penelitian yaitu dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di sekitar objek wisata penelitian, diketahui bahwa walaupun penduduk sekitar sudah mendapatkan hasil berupa pendapatan dari keterlibatan di Ranu Grati,

ternyata hasil pendapatan tersebut belum terlalu berarti sebagai penunjang kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Hasil penelitian lainnya adalah “Dampak Taman Krida Wisata Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 1990 – 2003 (Krisnasari: 2008)” dengan menggunakan metode sejarah kritis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung serta permasalahan ekonomi yang ditimbulkan. Hasil dari penelitian ini adalah taman krida wisata berpengaruh, baik positif dan negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya khususnya masyarakat sekitar Wagu Wetan. Pengaruh positif bidang ekonomi adalah sebagai penyedia lapangan kerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah. Pengaruh positif bidang sosial antara lain peningkatan taraf hidup dan kondisi lingkungan sosial. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya taman krida wisata adalah penggunaannya yang tidak tepat sasaran.

Selanjutnya adalah penulisan mengenai “Dampak Kegiatan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Kawasan Terumbu Karang di Padaido dan Biak Timur Daratan” yang menggunakan metode observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya adalah, keterlibatan banyak pihak telah membuat kawasan wisata bahari makin berkembang dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya melalui berbagai jenis usaha yang mulai dibuka. Data menunjukkan sebagian besar masyarakat (responden) berpandangan bahwa sektor wisata bahari yang dikembangkan di kampungnya telah memberikan keuntungan ekonomi bagi dirinya, keluarga dan masyarakatnya. Namun, sarana dan prasarana wisata

bahari yang disediakan dan dikembangkan masyarakat kawasan terumbu karang masih terbatas dan belum cukup mampu menyediakan seluruh kebutuhan wisatawan, sehingga banyak kebutuhan wisatawan disediakan dari daerah perkotaan.

“Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Pariwisata Sanur, Denpasar – Bali) oleh Sudarta (2002)”, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan pariwisata penulis melakukan pengambilan data melalui pengedaran daftar pertanyaan dan wawancara serta menggunakan metode deskriptif analisis sebagai analisa hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut adalah: (1) dampak sosial-ekonomi, antara lain: perubahan pekerjaan dari jenis pekerjaan non-pariwisata ke pekerjaan yang berhubungan dengan sektor pariwisata; meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha; perubahan pola pembagian kerja yang keseluruhannya memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat; (2) dampak terhadap penggunaan lahan dari lahan hijau menjadi bangunan-bangunan yang digunakan untuk mendukung perkembangan pariwisata yang mengakibatkan berubahnya fungsi ekologis kawasan dalam kurun waktu dasawarsa terakhir; (3) pengelolaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara daya tarik dan objek wisata serta meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia secara kualitas dalam rangka peningkatan pelayanan dan profesionalisme.

“An Identification Of The Effects of the Promotion of Tourism Transportation on the Socio-Cultural Environment: The Case of Malaysia by Sharon Cheuk, Janie Liew-Tsonis, Grace Phang Ing and Izyanti Awang Razli (2010)” yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk wawancara mendalam serta kuisioner semi-terstruktur yang digunakan untuk memastikan/ panduan selama

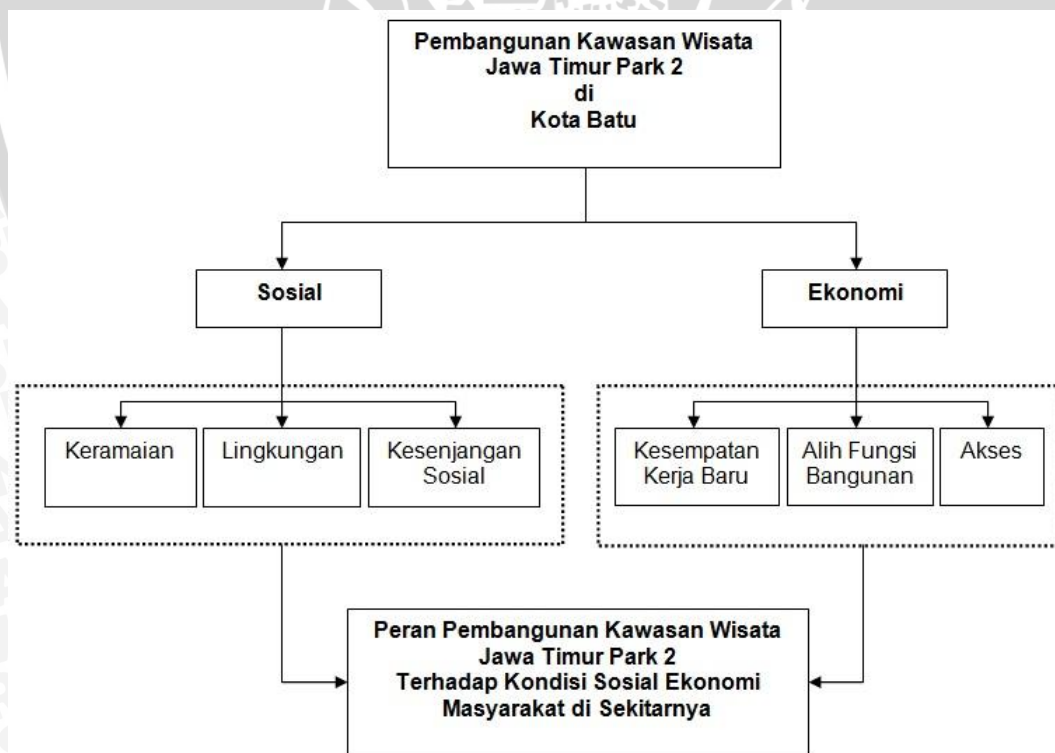
melakukan wawancara. Hasil dari penelitian itu sendiri adalah adanya promosi pariwisata yang dilakukan merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai promosi pengembangan pariwisata yang ada di Malaysia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya promosi pariwisata adalah adanya pengaruh aspek negatif yang ditimbulkan dari budaya asing, misalnya: cara berpakaian dan sopan santun. Dampak negatif lainnya adalah adanya degradasi budaya, mulai ditinggalkannya cara-cara tradisional serta mulai terganggunya kehidupan dan aktivitas masyarakat lokal.

Penelitian terakhir dengan judul *“Economic and Social Impact Of Tourism On a Small Town: Peterborough New Hampshire (Tomoko Tsundoda, Samuel Mendlinger: 2009)”* yang bertujuan untuk mengetahui dampak social dan ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembangunan pariwisata. Dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, kedua peneliti mengambil 27 responden yang dibagi dalam 3 kategori: (1) *tourism industry people*, (2) *affluent local* dan (3) *working local*. Hasil dari penelitian tersebut adalah seluruh responden mengakui bahwa pariwisata memberikan dampak baik positif maupun negative terhadap kehidupan mereka, namun mereka tidak ingin mengubah kotanya hanya untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, pariwisata dikatakan mampu memberikan sumbangan ekonomi besar terhadap perekonomian kota, namun untuk masyarakat tidak banyak memberikan keuntungan. Adanya ketakutan akan terjadinya polarisasi ekonomi dan pembagian kelas social merupakan alasan utama mengapa masyarakatnya enggan melakukan pengembangan di bidang pariwisata.

2.6. Kerangka Pikir

Melalui pemaparan di atas, dari beberapa objek wisata yang ada, seperti Jawa Timur Park, Museum Satwa dan Secret Zoo, Batu Night Spectacular, Selecta, Pemandian Songgoriti, Kusuma Agrowisata, dan sebagainya. Pariwisata Kota Wisata Batu banyak memberikan pengaruh, baik social dan ekonomi terhadap masyarakatnya, khususnya di daerah sekitar lokasi wisata. Secara sederhana, penulis menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 2.4 Kerangka Pikir



Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2014

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, atau menurut Sugiyono (2010) sering disebut juga dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci serta pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan menurut Moleong (2011), metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode yang berupaya untuk memahami lebih dalam mengenai suatu fenomena yang berkaitan dengan subyek penelitian yang tercermin dalam perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diungkapkan sebelumnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Wisata Batu terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata atau DTW di Kota Batu, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menemukan masalah penelitian dengan pendekatan informal. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, masalah berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian dapat

mengarahkan pada penyusunan suatu dugaan atau hipotesis (Indriantoro dan Supomo, 1999).

Fenomenologis dipilih untuk memahami arti suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih mendalam. Disini diasumsikan peneliti lebih tidak mengetahui dibandingkan dengan informan. Peneliti harus menghargai subyektifitas dari informan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang sesuatu yang sedang diteliti (Moleong, 2011).

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, diharapkan dalam penelitian ini akan diperoleh mengenai gambaran yang jelas mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan di sektor pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Batu. Dengan menggunakan metode tersebut, penulis akan tetap menghargai dan memperhatikan subyektifitas dari jawaban informan, sehingga akan diketahui kondisi lapangan yang sebenarnya, tentunya masih dalam batasan kerangka pikir yang telah ditentukan sebelumnya di atas.

Selain itu, dalam penemuan fakta-fakta dalam penggunaan pendekatan fenomenologis, penulis perlu untuk memindahkan apa yang ditangkap dari hasil penelitian sehubungan dengan pengaruh pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Wisata Batu. Hasil yang dimaksud, misalnya: subyek; opini; kejadian; dialog dan sebagainya. Yang akan akan direkap secara rinci, dengan meminimalisir adanya penyingkatan atau pengevaluasian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi informasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelian ini bersifat menggali suatu fakta dan hubungan kausalitas (sebab-akibat), serta untuk mengetahui kejadian di balik fenomena yang ada, maka pendekatan kualitatif perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pengaruh pertumbuhan

pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di lokasi sekitar daerah tujuan wisata.

3.2 Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti yaitu dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan sektor pariwisata. dari unit analisis tersebut, akan diungkap secara lebih mendalam tentang dampak pariwisata terhadap masyarakat. Selanjutnya, ditentukan juga informan yang akan dipilih sebagai sampel dalam menjawab pertanyaan sehubungan dengan pengaruh pariwisata.

Informan utama yang dibidik oleh penulis adalah masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata di Kota Batu. Dalam tujuannya untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi masyarakat, penulis menggunakan masyarakat di sekitar objek wisata sebagai informan utama. Sedangkan informan penunjang lainnya adalah pengelola objek atau tempat wisata sebagai informan penunjang, mengingat peranannya dalam upayanya memberikan sumbangsih terhadap perekonomian Kota Batu pada umumnya, dan juga terhadap masyarakat di sekitarnya.

3.3 Penentuan Informan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan sektor pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Wisata Batu. oleh sebab itu, digunakan *nonprobability sampling* dengan teknik pemilihan *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang tepat dalam penelitian ini. Sugiyono (2010) menerangkan bahwa

non-probability sampling adalah teknik pengambilan informan yang tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih menjadi informan. Metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dari peneliti, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2010) penentuan unit informan dianggap telah memadai/ cukup apabila telah sampai kepada taraf "*redundancy*" (datanya telah jenuh, dan apabila ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang benar.

Dalam penelitian ini metode *purposive sampling* akan diberlakukan pada informan utama yaitu masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya warga lokal yang menetap dan tinggal di sekitar lokasi wisata, namun juga warga lokal dan/atau warga luar yang membuka usaha langsung di sekitar lokasi wisata.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, kuisioner dan pengumpulan catatan. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2011), penelitian kualitatif data yang paling utama berasal dari kata-kata dan tindakan, sedangkan data lain seperti dokumen dan lain-lainnya hanya berfungsi sebagai data tambahan. Selanjutnya, akan diterangkan secara lebih rinci mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu:

- a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono: 2010). Selain bertujuan untuk melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden. Wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, hal ini dilakukan karena wawancara dilakukan secara langsung tanpa dilakukan penyusunan terlebih dahulu. Moeloeng (2011) menyatakan bahwa dalam jenis wawancara ini, informan biasanya terdiri dari mereka yang telah ditentukan sebelumnya (dipilih), yang memiliki kapabilitas dan informasi yang dibutuhkan, serta mendalami masalah yang diteliti. Sehingga lebih mengetahui mengenai informasi yang diperlukan.

b) Observasi

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan dari metode observasi itu sendiri adalah data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari *response bias* (Indriantoro dan Supomo, 1999). Selanjutnya, observasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: observasi langsung (*direct observation*), *participant observation*, *nonparticipant observation*, *content analysis* dan observasi mekanik.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik observasi partisipan (*participant observation*), yaitu dengan cara melibatkan diri secara langsung atau menjadi bagian dari lingkungan sosial yang sedang diamati. Peneliti akan mengamati secara langsung perilaku dan kejadian sosial terhadap kondisi lapangan yang diteliti. Teknik yang digunakan

oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah kombinasi *antara content analisis*, yaitu dengan dengan melakukan pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen, dan dengan wawancara tidak terstruktur. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh data yang tepat dan akurat dalam menjawab permasalahan penelitian .

c) Kuisisioner

Kuisisioner adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang dikemukakan secara tertulis. Disini penulis juga harus terlibat secara langsung dalam proses pengambilan data. Kuisisioner dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan peneliti serta jawaban responden secara tertulis. Dengan demikian akan memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro dan Supomo, 1999). Kuisisioner dilakukan dengan cara penyampaian langsung oleh penulis kepada masing-masing sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Kuisisioner disini akan ditujukan kepada masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi wisata yang ada di Kota Batu.

d) Pengumpulan Data

Selain menggunakan data dari hasil wawancara, observasi, dan kuisisioner, data lain yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian kualitatif adalah data yang berasal dari catatan di lapangan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2011) bahwa catatan lapangan merupakan sebuah catatan tertulis tentang sesuatu yang didengar, dilihat, dialami, dan difikirkan. Sehingga dengan penggunaan data yang berasal dari pengumpulan catatan di lapangan tersebut akan diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat.

Selain itu, penulis juga akan melakukan studi pustaka, dengan mempelajari literatur, baik jurnal ilmiah, buku-buku, laporan badan pusat statistik, maupun media elektronik, berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pertumbuhan pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian, menurut Indriantoro dan Supomo (1999) tahapan penelitian yang terdiri dari tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi lainnya, yaitu: pengeditan, pemberian kode, dan pemrosesan data dengan sebelumnya peneliti telah melakukan pengumpulan semua data yang diperlukan dalam penelitian melalui teknik pengumpulan data yang dijelaskan sebelumnya.

Menurut Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa

"analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, ... Untuk kemudian dianalisis dengan proses penalaran secara ilmiah, penuturan, penafsiran, perbandingan, dan kemudian penggambaran fenomena-fenomena yang terjadi secara apa adanya, guna dapat mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran dengan cara menguraikan dalam kata-kata."

Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi yang rinci tentang situasi, interaksi, peristiwa, orang dan perilaku yang teramati, atau petikan-petikan kalimat langsung dari seseorang tentang pengalaman, pikiran, sikap dan keyakinannya, serta petikan-petikan dokumen, surat dan rekaman-rekaman lainnya. Metode analisis kualitatif didasarkan pada data primer maupun data sekunder yang bersifat kualitatif. Proses analisis data kualitatif merujuk pada pemaparan data dan penggambaran data sebagai teks secara analitis.

Data dalam penelitian kualitatif ini akan melalui tahap pembacaan, penelusuran dan refleksi data sehingga menggambarkan kemungkinan satuan dan hubungan tertentu. Kemudian data disaring untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan pemaknaan berdasarkan ciri hubungan makna dan pertaliannya dengan fakta yang diacu sebagaimana terdapat dalam dunia nyata. Metode analisis data dalam penelitian ini bisa dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang tercatat di lapangan. Dengan melakukan reduksi data, diharapkan akan menghasilkan data yang sesuai, terklarifikasi dengan jelas, tepat guna, serta terorganisir. Reduksi data ini berlangsung selama penelitian dilaksanakan, sehingga data yang diolah nantinya akan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Reduksi data akan dilakukan terhadap laporan-laporan yang bersangkutan dengan data pariwisata, seperti: kunjungan wisatawan, pendapatan pariwisata, pajak dan retribusi, yang diperoleh dari badan pusat statistik Kota Batu atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Batu. Selain itu juga akan digunakan literatur penunjang lainnya seperti peraturan dan undang-undang.
2. Penyajian data (*data display*), data yang telah terkumpul dan terklarifikasi selanjutnya disajikan dalam tabel maupun kalimat. Kumpulan data tersebut selanjutnya dapat menjadi informasi yang tersusun dengan baik, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Merumuskan kajian pustaka yang berhubungan dengan pengaruh pertumbuhan sektor pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata Kota Batu.
4. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Data yang diperoleh di lapangan, dianalisis dengan beberapa cara untuk mencapai validitas dan akuratisasi (Sugiyono, 2010). Selain itu, penulis juga akan memberikan saran dengan didasarkan pada kesimpulan penelitian dengan tujuan untuk mengaplikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.6 Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh tersebut reliable, dan valid maka penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer atau sekunder melalui berbagai teknik yang telah diterangkan sebelumnya. Namun, untuk memperkuat data tersebut maka perlu dilakukan suatu pengujian keabsahan data.

Moleong (2011) mengungkapkan bahwa keabsahan data merupakan setiap keadaan harus memenuhi 3 hal, yaitu:

- 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar;
- 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan;
- 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Dalam penelitian ini, keabsahan data akan dilakukan dengan metode Triangulasi. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori, dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapatan dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumenter yang berkaitan.

Sehubungan dengan itu, keabsahan data akan dilakukan dengan membandingkan antara data hasil pengamatan dengan wawancara terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata di Kota Batu satu dengan yang lainnya serta informan pendukung, yaitu pegawai Pemerintah Daerah yang diwakili perangkat desa/kelurahan terkait, para pengelola tempat wisata dan juga para pengusaha yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian penulis.



BAB IV

PERAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA JAWA TIMUR PARK 2 TERHADAP KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SEKITAR

Pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park 2 (JTP 2) seharusnya bisa memberikan banyak manfaat bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi wisata. Salah satunya adalah dampak sosial masyarakat yang bisa dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Berikut akan dijelaskan mengenai dampak sosial yang timbul akibat adanya pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park 2 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

4.1 Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Keramaian

Pembangunan kawasan wisata JTP 2 tentunya menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Peningkatan kunjungan ini memberikan banyak pengaruh terutama terhadap pihak pengelola, berikut penuturan dari **Ibu Mira** selaku perwakilan dari pihak pengelola kawasan wisata JTP 2.

“Kalau pengunjung alhamdulillah mbak sejak dibangun hingga berjalan beberapa tahun ini pengunjung terus mengalami peningkatan. Kita menghitung dari jumlah tiket masuk dan kalau liburan (*peak-season*) jumlah pengunjung kami bisa meningkat hingga 200%. Ini kan menunjukkan kalau animo masyarakat terhadap kawasan Jatim Park 2 (Museum Satwa dan Batu Secret Zoo) sangat tinggi ya. Harapan kita nantinya pertambahan pengunjung ini juga berdampak ke kawasan wisata lainnya seperti JTP 1 dan BNS, sering ada paket-paket hemat itu juga tujuannya agar wisatawan ikut menikmati pilihan wisata lainnya.”

Dari pernyataan di atas, Bu Mira sebagai perwakilan dari pengelola objek wisata menyatakan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator keramaian bagi pihak pengelola objek wisata. Dengan adanya peningkatan keramaian tersebut, tentunya akan memberikan tambahan

pendapatan untuk objek wisata sendiri. Pada awal pembangunannya pada tahun 2010, JTP 2 hadir dengan satu jenis objek wisata yaitu Museum Satwa yang merupakan objek wisata buatan yang menampilkan replika makhluk hidup beserta alamnya. Setelah museum satwa selanjutnya dibangun objek wisata *Batu Secret Zoo* yang menghadirkan binatang asli dan juga habitatnya yang dikemas dengan konsep kebun binatang mini. Yang terbaru untuk tetap menarik kedatangan wisatawan, JTP 2 kembali menawarkan objek wisata baru dengan konsep *back to nature* dan *go green* yang menghadirkan kehidupan satwa beserta pengelolaan bahan daur ulang serta himbauan untuk turut menjaga kelestarian alam. Ketiga objek wisata yang dihadirkan oleh JTP 2 tersebut kemudian membentuk suatu kawasan wisata yang kini dilengkapi dengan hotel *pohon inn*, restoran dan juga pasar oleh-oleh yang tersedia bagi wisatawan.

Dalam tujuan memaksimalkan ramainya tingkat kunjungan di JTP 2 tersebut, pihak pengelola kemudian menawarkan berbagai paket wisata tentunya bagi objek wisata yang masih dalam satu naungan pengelola. Di bawah pengelolaan Jawa Timur Park Group, ada *Jawa Timur Park 1*, *Jawa Timur Park 2*, *Batu Night Spectacular* dan *Museum Angkut* yang seharusnya bisa turut merasakan keramaian yang ada di JTP 2. Oleh karena itu pihak pengelola menawarkan berbagai pilihan paket wisata dengan harga yang lebih murah untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya berkunjung ke objek wisata yang dikelola oleh Jawa Timur Park. Diakui oleh Bu Mira kenaikan jumlah wisatawan biasanya terjadi pada musim liburan sekolah, libur hari besar dan libur nasional dimana peningkatan jumlah pengunjung yang dihitung dari tiket masuk bisa mencapai 200%. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan jumlah pengunjung yang menyebabkan keramaian di kawasan wisata tersebut memberikan keuntungan ekonomis terutama bagi pihak pengelola kawasan wisata Jawa Timur Park 2. Pembangunan kawasan wisata oleh pihak pengelola yang semakin

inovatif juga merupakan salah satu faktor utama yang bisa menarik kunjungan wisatawan ke JTP 2 tiap tahunnya.

Selain pihak pengelola, keuntungan ekonomis lainnya juga mungkin dirasakan pihak lain yang turut serta dalam membuka usaha pendukung pariwisata. Salah satunya **Ibu Sun** yang merupakan salah satu warga lokal desa oro-oro ombo yang membuka usaha warung kopi kecil-kecilan tak jauh dari lokasi wisata JTP 2.

“Pelanggan saya malah kebanyakan bukan wisatawan mbak, biasanya orang-orang sini saja yang sekedar mampir ngopi. Kalau pengunjungnya sedang banyak, yang ngopi malah sopir-sopirnya karena kalau sudah musim liburan, parkir kan sampai disini mbak. Jadi supir-supir yang menunggu rombongan ini biasanya yang mampir sampai sore, biasanya juga tukang parkir yang di sekitar sini...”

Peningkatan jumlah wisatawan juga merupakan indikator keramaian yang dikatakan oleh Ibu Sun, dijelaskan bahwa peningkatan jumlah pengunjung terutama rombongan yang membawa kendaraan besar dan bis memberikan keuntungan tersendiri bagi warungnya. Dengan semakin banyaknya rombongan yang datang sangat mungkin jika supir-supir yang bertugas menunggu wisatawan mampir sekedar membeli kopi di warungnya. Pembeli inilah yang kemudian secara langsung memberikan sumbangan pendapatan bagi Ibu Sun, selain itu letak warung yang tidak jauh dari lokasi parkir membuat Ibu Sun banyak diuntungkan dengan terjangkaunya lokasi tersebut. Selain para supir rombongan wisatawan, petugas parkir dadakan yang muncul apabila lokasi wisata mulai ramai merupakan pembeli utama yang turut menambah pendapatan Ibu Sun.

Para petugas parkir ini bertugas untuk mengatur kendaraan yang lewat di sepanjang jalan menuju lokasi wisata dan mengatur parkir kendaraan yang tidak tertampung di dalam lokasi parkir objek wisata Jawa Timur Park 2. Sehingga hampir bisa dipastikan apabila musim liburan tiba, warung Ibu Sun selalu ramai

didatangi pembeli terutama para supir rombongan wisata dan tukang parkir. Selain meningkatnya jumlah pengunjung wisata, tersedianya berbagai macam toko penyedia kebutuhan wisatawan secara langsung akan menarik jumlah pengunjung yang datang untuk mampir membelanjakan uangnya di daerah tersebut. Seperti pernyataan di bawah ini

“Seneng mbak, makin banyak yang buka kan makin ramai, makin banyak pilihan jadi bisa mengundang pengunjung mampir. Kalau pedagang yang disana (*gerobak dorong*) itu dateng kalau pas liburan saja, beberapa toko disini seperti oleh-oleh, kaos itu juga hanya buka pas liburan saja. Kalau hari biasa gini, hanya beberapa toko yang buka, rata-rata penjual makanan.”

Menurut **Ibu Novi**, makin variatifnya jenis dagangan yang ada di kawasan objek wisata JTP 2 membuat banyak wisatawan yang tertarik untuk mampir dan berbelanja. Ibu novi sendiri sebagai salah satu penjual oleh-oleh berupa kripik buah khas batu merasakan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah toko yang buka di ruko depan kawasan wisata, semakin menarik wisatawan untuk mampir walau hanya sekedar melihat-lihat. Dengan tujuan awal untuk mampir inilah yang kemudian bisa mendorong banyak wisatawan untuk berbelanja di daerah pertokoan tersebut. Dari pernyataan ini bisa dilihat bahwa semakin banyak jumlah pedagang dan juga semakin variatifnya produk yang ditawarkan menjadikan kawasan perbelanjaan di depan objek wisata turut merasakan keramaian. Tentunya dengan makin meningkatnya keramaian ini akan membawa keuntungan ekonomis bagi para pedagang yang membuka usaha di ruko depan lokasi wisata.

Mendukung pernyataan dari Ibu Novi di atas, **Ibu Mira** selaku perwakilan dari pihak pengelola sendiri juga menyatakan bahwa pembangunan objek wisata JTP 2 membuka peluang besar bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan keuntungan.

“Pembangunan wisata disini saya pikir memberikan banyak manfaat untuk warganya ya, dibukanya kawasan oro-oro ombo yang dulunya

hutan dan terpencil kini menjadi kawasan yang sangat ramai. Ini seharusnya bisa dijadikan kesempatan bagi warga sekitar untuk memanfaatkannya, bisa langsung buka usaha atau lainnya.”

Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa pembukaan lahan yang kemudian digunakan untuk pembangunan kawasan wisata JTP 2 bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Pembangunan kawasan wisata yang menarik banyak orang untuk beredat di sekitar wilayah mereka merupakan keuntungan tersendiri bagi warga lokal. Bu Mira juga menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan wisata sebagai pendorong pembangunan di daerah oro-oro ombo khususnya bisa membantu masyarakat untuk bisa memperoleh tambahan ekonomi bagi yang bisa memanfaatkan.

Kontras dengan beberapa pernyataan di atas, pendapat lain kemudian muncul dari pihak yang merasakan dampak negatif dari adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2. Berikut penuturan dari **Bapak Sundjojo** yang merupakan perwakilan dari salah satu warga lokal yang sudah tinggal di kawasan tersebut sekitar lebih dari 10 tahun.

“Kalau menurut saya belum ada pengaruh positifnya, apalagi disini cuma dapat asap kendaraan yang lewat. Kalau liburan di depan rumah saja sudah bisa macet mbak, jadi kendaraan tidak bisa keluar rumah. Belum lagi kalau warga di sekitar sini punya acara, ‘*mantu*’ misalnya, ya bisa batal acaranya kalau jalanan ini sudah padat kendaraan”

Pernyataan di atas merupakan bentuk tanggapan lain akibat adanya peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke kawasan wisata JTP 2. Bapak Sundjojo menuturkan bahwa kenaikan jumlah pengunjung yang datang berwisata ke kawasan wisata JTP 2 mengundang keramaian hingga yang menyebabkan terjadinya kemacetan di sepanjang daerah menuju kawasan wisata Jaw Timur Park 2. Letak rumah yang berada sekitar $\pm 200\text{m}$ dari kawasan wisata membuat Bapak Sundjojo merasa terganggu akibat kemacetan yang ditimbulkan. Dalam beberapa tahun terakhir memang terlihat adanya kemacetan parah yang terjadi akibat membludaknya kunjungan wisata di kawasan wisata JTP 2.

Apabila lokasi parkir tidak lagi memungkinkan untuk menampung kendaraan yang datang maka pinggiran jalan merupakan satu-satunya lokasi yang dipilih untuk memarkir kendaraan. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya kemacetan di sepanjang jalan tersebut, selain itu antrian panjang menuju gerbang masuk objek wisata juga turut menyumbang macetnya kendaraan yang ingin masuk. Dengan memberikan contoh berupa gelaran acara warga yaitu '*mantu*', Bapak Sundjojo mengungkapkan bahwa kemacetan yang terjadi ini menyebabkan terganggunya aktivitas warga. Hal ini kemudian menjadi sisi lain akibat peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke kawasan wisata Jawa Timur Park 2.

Senada dengan pernyataan Bapak Sundjojo di atas, **Pak Ahmad** juga selaku warga lokal daerah oro-oro ombo mengungkapkan hal yang sama yaitu,

"Museum satwa saya pikir tidak memberikan banyak pengaruh terhadap saya dan keluarga, karena kami kan buruh tani disini mbak tinggal disini sudah lama dan dengan adanya pembangunan lokasi wisata disini yang kami tau makin menyulitkan saya untuk bekerja. Disini dulu banyak lahan pertanian, oang-orangnya juga banyak yang bertani kalau sekarang jujur saja kita kesulitan mencari lahan kerja dan belum lagi kalau sudah banyak bis parkir disini, kami tidak bisa berangkat ke sawah."

Pak Ahmad juga merupakan perwakilan dari warga lokal desa oro-oro ombo yang tinggal selama hampir 10 tahun di daerah tersebut. Dengan mata pencaharian sebagai petani, Bapak Ahmad tetap berangkat menggarap lahannya setiap hari walaupun keadaan sedang ramai. Keramaian yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah wisatawan yang datang membuat Pak Ahmad merasa kesulitan ketika bekerja karena muatan rumput yang biasa dia bawa. Selain itu makin banyaknya lahan yang dibuka untuk melakukan pembangunan membuat jumlah sawah dan ladang semakin berkurang di daerah oro-oro ombo. Mengingat mata pencaharian Bapak Ahmad yang masih menggarap ladang/sawah dan beternak, tentunya kemacetan menjadi penghalang apabila Bapak Ahmad

berangkat bekerja terutama dengan membawa muatan banyak rumput. Dengan makin banyaknya kendaraan yang parkir di pinggir jalan apalagi bila terjadi kemacetan panjang, Pak Ahmad mengaku kesulitan ketika berangkat ke swarh terutama bila membawa banyak muatan untuk ternak.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh **Ibu Sri** yang merupakan salah satu warga di daerah oro-oro ombo.

“...tapi ya gitu, kalau BNS ini kan sampai malam, jadi kalau liburan yo masih macet sampe bengi mbak. Siang gak bisa istirahat *rame* wisata di jatipark *lek bengi* juga susah tidur kalo kendaraan masih padat disini sampe BNS tutup. *Wong* kendaraan itu kalo parkir bisa sampai di depan sini, bis besar *gitu* sampe malem.”

Kawasan tempat tinggal yang berada di dekatar jalan menuju lokasi wisata, terutama jalan penghubung antara kawasan wisata JTP 2 menuju BNS sangat merasakan apabila kunjungan wisatawan sedang ramai. Peningkatan jumlah pengunjung rombongan yang datang dan memarkir kendaraan di pinggir jalan merupaka masalah tersendiri bagi warga. Paket terusan yang ditawarkan oleh pihak pengelola wisata rupanya banyak yang dimanfaatkan oleh pengunjung terutama rombongan yang biasanya mendapatkan harga miring. Dengan paket terusan ini pengunjung bisa berwisata hingga menjelang malam ke kawasan BNS yang letaknya tidak jauh dari kawasan wisata Jawa Timur Park 2.

BNS yang dirancang sebagai wahana wisata yang buka hingga malam hari yaitu pukul 00.00 membuat parkir kendaraan di pinggir jalan bisa sampai malam hari. Bu Sri mengungkapkan bahwa keramaian ini cukup mengganggu terutama jam istirahat mereka. Dikatakan bahwa kepadatan yang terjadi hingga tengah malam memang cukup meresahkan terutama bagi mereka yang tinggal di sepanjang jalur menuju kedua lokasi wisata. Senada dengan pernyataan Ibu Sri, **Pak Jo** yang membuka usaha di jalur keramaian juga merasakan dampak yang sama.

“,,,musim liburan ini kalau disini sudah nggak pernah sepi sampai malam mbak, orang lewat, kendaraan bisa sampai pagi. Saya aja kalau tidur di toko juga gak bisa istirahat *mbak*.”

Ramainya orang lalu lalang dan keramaian lalu lintas akibat banyaknya jumlah kendaraan wisatawan yang datang di daerahnya menyebabkan terjadinya kebisingan yang cukup meresahkan warga. Hal tersebut selalu terjadi apabila musim libur panjang (*high season*) tiba dan juga libur sekolah dimana para wisatawan ini memilih untuk berkunjung seharian di kawasan wisata Jawa Timur Park 2 dan melanjutkan kunjungannya ke BNS. Lokasi rumah yang tepat di pinggir jalan, memberikan keuntungan bagi Pak Jo melalui dibukanya usaha kecil di rumahnya namun dampak lain yang dirasakan akibat keramaian adalah kebisingan yang cukup mengganggu apabila musim liburan tiba.

Lain halnya yang dirasakan oleh **Ibu Ita**, sebagai salah satu warga kelurahan sisir yang letaknya berada sekitar $\pm 500\text{m}$ dari objek wisata Eco Green Park.

“kalau di daerah saya ini biasanya dijadikan parkir mobil-mobil mbak, kalau di dalam sudah *gak nampung kan* langsung dialihkan kesini *nah* mereka jalan ke museum. Lumayan *rame* apalagi kalau liburan panjang ini penuh sampai sana, rata-rata ke museum, eco green”

Membludaknya jumlah pengunjung kawasan wisata JTP 2 memicu keramaian hingga sebagian wilayah sisir yang bisa dikatakan berada cukup jauh dari lokasi wisata. Bu Ita menyatakan bahwa jika jumlah kendaraan pengunjung sudah cukup ramai, banyak juga kendaraan yang memilih memarkir kendarannya di pinggiran jalan walaupun jauh dari lokasi wisata. Keramaian ini tentunya dirasakan oleh warga Kelurahan Sisir yang sebagian besar dari lahan meraka hanya disinggahi sebagai lokasi parkir kendaraan.

Bukan hanya warga di daerah oro-oro ombo saja yang merasakan dampak yang ditimbulkan oleh kemacetan yang terjadi, namun di daerah

kelurahan temas yang terletak sekitar \pm 800m dari lokasi wisata juga merasakan dampak yang sama.

“kalau macet sudah biasa *mbak*, biasanya natal dan taun baru ini kan liburan panjang banyak yang rekreasi kesini. Di depan gang sini sudah macet *mbak*, *aras-aras-en kate metu*, malah orang sini lebih banyak di rumah kalau liburan. Macetnya ini juga bisa sampe daerah pasar, pertigaan pendem situ juga sudah gak bisa lewat”

Lokasi tinggal yang cukup jauh dari kawasan wisata rupanya masih bisa merasakan dampak yang ditimbulkan akibat adanya peningkatan jumlah pengunjung JTP 2. Lokasi rumah tinggal Ibu Siti di daerah kelurahan temas yang letaknya cukup jauh dari kawasan wisata ternyata juga masih bisa merasakan kemacetan akibat keramaian pengunjung. Apabila memasuki musim liburan mulai libur sekolah hingga libur hari besar jumlah pengunjung kawasan wisata di Kota Batu meningkat secara drastis, terutama di kawasan wisata JTP 2 yang memang menjadi salah satu idola kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan ini membuat kemacetan panjang hingga sekitar 1km jalan masuk Kota Wisata Batu, melalui daerah pendem saja bisa terlihat kemacetan panjang yang salah satunya disumbang oleh keramaian tempat wisata. Ibu Siti mengungkapkan bahwa warga lokal sendiri terutama di daerah sekitar lokasi wisata sudah enggan keluar rumah apabila musim liburan tiba, banyak warga yang memilih tinggal di rumah daripada ikut menyumbang kemacetan di jalan raya. Hal ini menunjukkan bagaimana keramaian akibat peningkatan jumlah pengunjung sangat mempengaruhi aktivitas warga sehari-hari.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, penulis bisa melihat bahwa pembangunan kawasan wisata JTP 2 memberikan dampak sosial salah satunya keramaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keramaian ini menunjukkan adanya dampak positif, antara lain:

1. Memberikan tambahan pendapatan bagi pihak pengelola karena jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan.

2. Memberikan tambahan pendapatan bagi warga yang turut berpartisipasi dalam usaha pariwisata, salah satunya usaha kecil (UKM) yang berada di sekitar lokasi wisata.
3. Menarik banyak pengunjung untuk mampir di salah satu pusat pertokoan di depan lokasi wisata JTP 2 karena para pedagang menawarkan jenis barang yang variatif sesuai dengan kebutuhan wisatawan.
4. Memberikan kesempatan yang luas bagi warga yang ingin berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pariwisata di daerahnya.

Selain dampak positif yang disebutkan diatas, sisi lain dari pembangunan pariwisata di daerah oro-oro ombo yang telah ditemukan dalam penelitian adalah:

1. Terganggunya aktifitas warga dikarenakan peningkatan jumlah pengunjung yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalur menuju lokasi wisata.
2. Menimbulkan kebisingan akibat banyaknya kendaraan dan juga rombongan yang berlalu-lalang di sepanjang kawasan wisata.
3. Kemacetan yang terjadi membuat warga lokal sendiri kurang leluasa untuk keluar-masuk wilayah rumah tinggal mereka sendiri.

Dampak pembangunan pariwisata yang memicu keramaian sendiri sama dengan hasil penelitian dengan tema yang sama yaitu "Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)" yang juga menyatakan bahwa warga di sekitar objek wisata Ranu Grati juga turut merasakan keramaian akibat dibangunnya lokasi wisata Ranu Grati. Sedangkan dampak negatif yang dibawa yaitu mulai terganggunya aktivitas dan kehidupan masyarakat lokal juga sama seperti yang terjadi dalam penelitian *"An Identification Of The Effects of the Promotion of Tourism Transportation on the Socio-Cultural Environment: The*

Case of Malaysia by Sharon Cheuk, Janie Liew-Tsonis, Grace Phang Ing and Izyanti Awang Razli (2010)".

4.2 Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Lingkungan

Dampak sosial lain yang muncul akibat adanya pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park 2 adalah terkait dengan kondisi lingkungan yang dirasakan warga di daerah sekitar lokasi wisata. Seperti pernyataan di bawah ini,

"....batu kalau siang kan sekarang lumayan panas daripada dulu, sudah nggak dingin lagi. Dulu kalau pagi saya masih bisa melihat kabut-kabut, kalau sekarang nganter anak berangkat sekolah saja sudah panas. Tapi bagi warga pendatang atau wisatawan ya tetep aja batu itu dingin"

Perubahan iklim merupakan salah satu hal yang dapat dirasakan akibat adanya pembukaan lahan hijau yang dulunya dimiliki kawasan desa oro-oro ombo. **Pak Dedi** sebagai warga asli batu sendiri merasakan betapa pembangunan lokasi wisata memberikan pengaruh terutama terhadap perubahan lingkungan sekitar. Beberapa tahun yang lalu mungkin masih bisa dilihat Kota Batu masih tertutup kabut di pagi hari, hal ini kemudian yang membuat Kota Batu menjadi salah satu kota dingin di daerah Malang Raya. Namun seiring dengan pembangunan pesat dan pembukaan lahan hijau, menurut Pak Dedi hal inilah yang kemudian lambat laun merubah iklim Kota Batu juga yang dari kota berhawa sejuk menjadi sedikit hangat.

Menyetujui pendapat Pak Dedi di atas, **Bu Retno** yang merupakan salah satu pedagang di kawasan ruko depan lokasi wisata JTP 2 juga mengungkapkan hal yang sama,

"Kalau sebagai warga terus terang kurang nyaman *mbak*, karena disini juga makin ramai seperti ini sampai malam ya, BNS itu buka sampai jam2 pagi *mbak*. Ramai, macet dan panas *mbak* sekarang ini disini, mungkin kalau orang *mbatu* sendiri sudah tidak betah."

Dikatakan bahwa meningkatnya kunjungan di kedua lokasi wisata yang berdekatan di satu daerah desa oro-oro ombo membuat kemacetan tidak dapat dihindari. Selain kenyamanan, diterangkan bahwa peningkatan jumlah orang yang berkunjung menyebabkan wilayah di desa oro-oro ombo mulai ramai dan panas. Warga lokal sendiri juga merasakan bahwa perubahan ini membuat iklim rumah tinggal mereka tidak lagi nyaman dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepadatan kendaraan dan manusia dikatakan menjadi penyumbang perubahan iklim yang dirasakan oleh warga, apabila terjadi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi wisata sudah bisa dipastikan asap kendaraan menjadi makanan pokok warga terutama yang tinggal di kawasan pinggir jalan sepanjang jalur lokasi wisata.

Selain perubahan iklim, masalah lingkungan alam lainnya terlihat apabila musim hujan tiba seperti pernyataan yang diungkapkan oleh **Mbak Dewi** selaku pedagang kaos dan souvenir di area pertokoan depan ruko JTP 2.

“...Dan jalanan di depan ruko ini *mbak*, kalau hujan sudah banyak genangan air seharusnya pihak pengelola tanggap juga karena kalau sudah banyak genangan disini orang yang beli juga *males*.”

Mbak Dewi mengungkapkan bahwa genangan air kini sering terjadi di daerah sekitar bangunan ruko yang baru dibangun. Bangunan ruko yang terbilang baru ini merupakan bangunan permanen yang disediakan untuk area pertokoan atau tempat usaha. Lokasinya yang berada tepat di depan objek wisata JTP 2 membuat area pertokoan ini menjadi persinggahan utama para wisatawan yang ingin berbelanja. Mengikuti pembangunan objek wisata, jalanan di depan lokasi pertokoan dibangun sedemikian rupa dengan dipasang paving dan langsung terhubung ke jalan raya utama. Memang nampak bahwa kurangnya lahan serapan untuk air saat hujan membuat sering terjadi genangan di depan lokasi pertokoan. Genangan air yang sering terjadi ini dikatakan Mbak Dewi bisa mengurangi minat wisatawan untuk mampir di area pertokoan

tersebut. Dengan demikian pendapatan para pedagang bisa berkurang karena wisatawan lebih memilih lokasi toko yang ada di dalam pasar wisata daripada harus berjalan jauh menuju pertokoan di depan.

Hal senada juga diungkapkan oleh **Bu. Yuli** selaku pengelola homestay di daerah oro-oro ombo, meskipun tidak menetap di daerah sekitar lokasi wisata Bu. Yuli juga turut merasakan dampak adanya perubahan lingkungan yang terjadi terutama setelah dibangunnya objek wisata Jawa Timur Park 2

“...Namun yang menjadi masalah yang kami alami sekarang adalah banjir mbak, kalau sudah hujan deras disini sering ada genangan air dan cuaca kota batu dirasakan memang beda ya dari pada yang dulu, sekarang lebih panas dan padat.”

Perubahan lingkungan yang sama juga dirasakan oleh Bu. Yuli yaitu perubahan iklim Kota Batu yang semakin panas dan padat akibat banyaknya jumlah pengunjung yang memenuhi daerah sekitar kawasan wisata JTP 2. Selain itu banyaknya material tanah yang ikut hanyut saat terjadi hujan deras dikatakan juga sering terjadi di daerah tersebut. Perubahan lingkungan yang dirasakan oleh warga merupakan dampak dari adanya penggunaan lahan hijau yang berlebihan untuk pembangunan objek wisata dan pembukaan lahan perumahan. Selain itu kepadatan juga sering terjadi akibat banyaknya wisatawan yang datang, selain kepadatan lalu lintas banyaknya jumlah rombongan juga menimbulkan kepadatan tersendiri di daerah sekitar kawasan wisata JTP 2.

Selain berdampak kepada lingkungan alam, perubahan juga dirasakan terjadi terhadap lingkungan sosial masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata dan juga kawasan penunjang usaha wisata lainnya.

“sejak semakin ramainya daerah sini, anak-anak muda-mudi sepertinya mulai ikutan gaya orang yang datang. Pakaian pendek-pendek, anak perempuan keluar sampe malam terus kelakuannya sekarang seperti nggak punya *unggah-ungguh* kalau sama orang tua”

Pernyataan **Bapak Ahmad** selaku perwakilan warga desa oro-oro ombo di atas merupakan pendapatan atas perubahan sikap yang terjadi pada anak-anak di daerah sekitarnya. Pembangunan pariwisata yang menyebabkan banyaknya wisatawan yang berkunjung dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, sikap yang berbeda lambat laun dinilai membawa pengaruh bagi anak-anak di daerah tujuan wisata. Interaksi secara langsung antara warga lokal dengan wisatawan merupakan penyebab dimana segala perbedaan tersebut bisa masuk dalam budaya lokal. Cara berpakaian, cara pergaulan dan tata krama menjadi sorotan utama pernyataan Bapak Ahmad mengenai perubahan yang terjadi setelah banyaknya kunjungan wisatawan di daerahnya.

Usia muda dikatakan rentan terpengaruh oleh lingkungan luar merupakan perhatian utama bagi warga terutama yang memiliki anak di usia tersebut. Oleh karena itu perubahan yang paling nampak bisa dilihat dari sikap pemuda-pemudi yang mulai sedikit berubah, seperti yang oleh **Bu Naning** yang merupakan warga lokal yang memiliki usaha di daerah kelurahan temas.

“lebih menyoroti ke sikap pemuda-pemudinya yaa, anak sekarang kepeduliannya terhadap orang lain kurang, wes gak peduli ke tetangganya gitu, rata-rata anak usia sekolah yang rawan mungkin karena masih muda..”

Kurangnya sikap kepedulian terhadap sesama atau acuh tak acuh menjadi hal utama yang disoroti oleh Ibu Naning terhadap perubahan sosial yang terjadi khususnya di kalangan pemuda. Masuknya wisatawan dengan membawa berbagai macam budaya diakui telah membawa banyak perubahan sikap anak-anak di daerah sekitar lokasi wisata. Selain cara berpakaian seperti yang telah diungkapkan sebelumnya tingkat kepedulian terhadap sekitar telah dirasakan juga oleh warga, kepedulian disini dikatakan menyangkut kebiasaan mengenal tetangga sekitar, kebiasaan sapa-menyapa dan juga keterlibatan dalam kegiatan

desa yang kini sudah mulai ditinggalkan terutama oleh generasi muda. Hal ini dinilai buruk karena kebiasaan seperti saling sapa inilah yang kemudian menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi dan membangun keakraban di antara warganya.

Lain pula hal yang diungkapkan oleh **Pak Dedi** selaku pemilik *homestay* di daerah oro-oro ombo yang mengungkapkan

“Wisatawan kan disini ada yang menginap hingga 3 hari atau lebih, ini yang saya kira sangat berbahaya bagi warga lokal terutama anak-anak. Kebiasaannya, gaya berpakaianya, cara bicaranya kan bisa saja menular ini ke orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Apalagi jika ada *homestay* yang wisatawan tinggal serumah dengan pemilik, harusnya orang juga mikir sebelum memilih membuka *homestay*”

Berbaurnya secara langsung antara wisatawan dengan masyarakat lokal tentunya membawa dampak tersendiri untuk masyarakat lokal terutama anak-anak yang dikatakan mudah meniru apa yang mereka lihat. Hal ini juga dinilai berbahaya terutama bagi mereka yang terang-terangan membuka akses bagi wisatawan atau bisa dikatakan sebagai orang asing untuk tinggal di daerahnya. Untuk mengatasi hal ini disarankan bagi para pengusaha terutama *homestay* atau *guest house* lebih bijak dalam membuka usahanya, sebisa mungkin memisahkan rumah tinggal dengan lokasi usaha terutama untuk penginapan wisatawan.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan akibat adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap lingkungan diatas terbagi atas dampak terhadap lingkungan alam dan dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat. Dampak terhadap lingkungan alam antara lain:

1. Perubahan iklim yang mulai dirasakan warga asli terutama yang tinggal di sekitar lokasi wisata, yang merasakan adanya peningkatan suhu udara yang membuat mereka kurang nyaman.

2. Membludaknya kunjungan wisatawan yang menyumbang terjadinya kemacetan menyebabkan daerah kawasan wisata menjadi daerah padat kendaraan dan kerumunan manusia terutama apabila musim liburan tiba/*peak season*.
3. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan hijau sebagai bangunan dan rumah tinggal ditunjukkan dengan banyaknya genangan air yang mulai terjadi di daerah sekitar lokasi wisata.

Sedangkan dampak lingkungan sosial masyarakat yang terjadi berdasarkan hasil penelitian, antara lain:

1. Perubahan cara berpakaian, cara bergaul dan tata krama terutama kepada pemuda-pemudi mulai dirasakan oleh masyarakat, mengingat generasi muda yang paling rentan terhadap masuknya budaya asing yang sekedar ditiru saja.
2. Kunjungan wisatawan dari berbagai daerah dengan bermacam budaya dan adat juga memicu sikap yang tidak peduli atau acuh tak acuh.

Melihat penelitian sebelumnya oleh “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)”. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan terhadap daerah Ranu Grati di daerah pasuruan menunjukkan bahwa lingkungan objek wisata kini tidak lagi bersih dikarenakan terjadi banyak penumpukan sampah. Tidak jauh dengan hasil penelitian sebelumnya, di sekitar kawasan sekitar objek wisata Jawa Timur Park 2 merasakan dampak pembangunan terhadap lingkungan yaitu adanya perubahan iklim dan banjir yang terjadi.

Penelitian lain yaitu “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Pariwisata Sanur, Denpasar – Bali) oleh Sudarta (2002)” juga mengungkapkan bahwa di daerah penelitian telah terjadi pengalihan lahan hijau menjadi bangunan

penunjang pariwisata. Alasan ini juga yang kemudian dalam penelitian ini menjadi alasan utama terjadinya perubahan iklim yang terjadi di daerah sekitar objek wisata JTP 2. Masih dalam penelitian yang sama bahwa dampak sosial yang muncul akibat adanya pembangunan kawasan wisata di daerah sanur mendorong masyarakat untuk berusaha memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki dimana masyarakat dituntut untuk bisa aktif berinteraksi dengan wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini yang belum terlihat dalam penelitian ini dimana kebanyakan pengunjung masih merupakan wisatawan domestik dan warga tidak dilibatkan langsung dalam pengelolaan objek wisata, terbukti dengan masih adanya beberapa warga yang masih mempertahankan mata pencaharian awal mereka sebagai petani dan peternak di tengah keramaian pembangunan wisata.

Dampak sosial lainnya juga diterangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh "*An Identification Of The Effects of the Promotion of Tourism Transportation on the Socio-Cultural Environment: The Case of Malaysia by Sharon Cheuk, Janie Liew-Tsonis, Grace Phang Ing and Izyanti Awang Razli (2010)*" yang menemukan pengaruh negatif akibat adanya promosi pariwisata yang dilakukan oleh daerahnya. Dampak yang dibawa oleh budaya asing tersebut adalah perubahan cara berpakaian dan juga sopan santun masyarakatnya, adanya degradasi budaya dan makin ditinggalkannya cara-cara tradisional oleh masyarakatnya sendiri. Selaras dengan hal tersebut, warga lokal di daerah oro-oro ombo juga merasakan adanya perubahan cara berpakaian dan juga sopan santun generasi muda mereka, masuknya budaya asing juga yang memberikan pengaruh tersebut terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata.

4.3 Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Kesenjangan Sosial

Dampak lain yang muncul akibat adanya pembangunan JTP 2 adalah kemunculan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Berikut penuturan dari **Bu. Sun** selaku warga oro-oro ombo yang memiliki usaha kecil di jalur menuju kawasan wisata.

“alhamdulillah sejak wisata museum ini dibangun kan saya bisa *nyambi* kerja di rumah *mbak*, lumayan buat *nambah-nambah*.”

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan Ibu Sun dalam membuka warung kecil-kecilan adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung lapangan futsal di daerah oro-oro ombo, namun dengan adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2 keberadaan warungnya bisa dikatakan sebagai pendukung pembangunan pariwisata. Demikian juga seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung yang datang, maka pendapatan Ibu Sun juga akan bertambah. Namun usaha ini bukan merupakan pekerjaan utama yang digunakan sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarganya, usaha ini merupakan usaha sampingan dimana berapapun pendapatan yang diterima dikatakan lumayan untuk memberikan tambahan. Bisa dikatakan bahwa kesempatan membuka usaha ini bisa meningkatkan kesejahteraan Ibu Sun berupa tambahan ekonomis bagi keluarganya.

Selain Ibu Sun, Bu Titik juga merasakan hal sama akibat adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2. Setelah adanya pembangunan objek wisata JTP 2 yang didukung dengan berbagai pembangunan di kawasan desa oro-oro ombo menjadikan kawasan tersebut semakin mudah dijangkau. Hal ini kemudian yang memberikan keuntungan tersendiri bagi **Bu Titik** yang merupakan warga sisir yang membuka usaha makanan di daerah sekitar objek wisata JTP 2.

“...walaupun gak banyak tapi tiap hari ada aja itu *mbak* yang beli, kan lumayan daripada *ngganggur* juga. Kalau dulu ya disini sepi, mau jualan

siapa yang beli? Sekarang mau jualan enak *kan*, pasar dekat sini kalau mau *kulakan*, dijual juga pembelinya lumayan.”

Pilihan Ibu Titik untuk membuka usaha makanan dilakukan ketika melihat banyaknya pengunjung wisata baik ke JTP 1 maupun JTP 2, walaupun sering dijadikan tempat parkir kendaraan beberapa wisatawan juga kerap mampir ke warungnya tersebut. Dengan semakin mudahnya akses dari desa oro-oro ombo menuju desa sisir melalui perbaikan jalan, keramaian JTP 2 kini juga dirasakan hingga ke kecamatan sisir. Pekerjaan sebelumnya sebagai ibu rumah tangga kini berubah menjadi penjual makanan yang bisa memberikan sedikit tambahan bagi keluarganya.

Berseberangan dengan kedua pernyataan sebelumnya yang merasakan adanya peningkatan kesejahteraan akibat tambahan pendapatan yang diterima dan jenis pekerjaan baru yang tersedia, hal lain dirasakan oleh **Bapak Sundjojo** selaku warga kelurahan temas.

“Jangan *“ditelan”* semua kegiatan ekonomi-nya, ajak masyarakat untuk menikmati keramaiannya. Selama ini kan semua kegiatan ekonomis seperti oleh-oleh, makanan, dan semua kebutuhan wisatawan sudah di-*handle* sendiri di dalam kawasan wisata..”

Pernyataan di atas cukup beralasan dengan melihat adanya pasar wisata yang terletak di dalam lokasi wisata (sebelah pohon inn) yang sengaja disediakan oleh pihak pengelola untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung, ditambah lagi dengan stand di pelataran yang juga tersedia bagi para pedagang yang tidak tertampung di dalam pasar wisata. Bapak Sundjojo menyatakan bahwa ketika pihak wisata sudah menyediakan semua kebutuhan di dalam kawasan wisata maka bagian yang seharusnya bisa dinikmati oleh warga bisa berkurang drastis.

Bahkan dikatakan bahwa untuk pengelolaan parkir, pihak wisata juga telah dikelola sendiri dalam naungan pengelolaan objek wisata. Bapak Sundjojo berharap pihak pengelola objek wisata benar-benar membagi pembangunan

dan keramaian wisata ini dengan masyarakat sekitarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sebagian pihak juga masih belum merasakan adanya perubahan akibat adanya pembangunan kawasan wisata Jawa Timur Park 2 terutama warga lokal yang lama tinggal di daerah tersebut. Pernyataan lainnya diungkapkan oleh **Ibu Sri** yang juga merupakan salah satu warga di daerah oro-oro ombo.

“...ikut usaha bagi yang punya banyak modal, kalau *gak* punya modal yaa mana bisa sewa tempat. Saya dengar kalau di dalam aja untuk sewa tempat sudah puluhan juta, ruko depan ini juga sudah ratusan juta lha kalau petani ya mana mau *mbak mbayar segitu*. Ini perlu jadi perhatian pemerintah dan pengelola, terutama pemerintah karena ini berhubungan denganarganya”

Ibu Sri menyatakan bahwa kepemilikan modal yang cukup merupakan faktor utama yang harus dipenuhi untuk bisa turut serta dan berpartisipasi dalam keramaian pembangunan pariwisata di daerahnya. Tingginya biaya sewa tempat usaha dan belum lagi modal yang diperlukan untuk membeli barang dagangan menjadi kendala utama bagi warga yang kurang mampu. Beberapa orang yang bekerja sebagai petani atau beternak lebih memilih untuk mempertahankan pekerjaannya dibandingkan harus mempertaruhkan nasib untuk membuka usaha pariwisata. Perhatian dari pemerintah dan pihak pengelola disini diharapkan dapat lebih bisa membantuk kehidupan warga di sekitarnya agar seluruh warga bisa menikmati keuntungan dari pembangunan pariwisata tersebut.

Pernyataan lain sehubungan dengan kesenjangan sosial yang mungkin terjadi akibat pesatnya pembangunan wisata di daerah oro-oro ombo adalah dengan semakin meningkatnya harga tanah yang tidak terjangkau oleh masyarakat lokal sendiri.

“perumahan baru itu kebanyakan pemiliknya warga luar kota, bukan orang *mbatu* sendiri *mbak*. Surabaya gitu, malang juga ada memang sengaja beli dan dijadikan *guest house*. Sekarang kan tanah disini sudah mahal *mbak*, dulu mahi sempet 300.000/m² sekarang sudah 750 sampai 1.000.000/m² jadi mending beli sekarang karena perkiraannya makin mahal ini disini”

Mbak Devi yang bekerja sebagai marketing beberapa *guest house* dan *homestay* yang tersebar di sekitar kawasan wisata JTP 2 juga melihat bahwa semakin banyak lahan penduduk yang tidak lagi dimiliki warga lokal. Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di desa oro-oro ombo dan sekitarnya membuat warga berbondong-bondong menjual lahan yang dimilikinya dengan alasan *return* yang tinggi. Pembangunan pariwisata pula menyebabkan harga tanah per-meter menjadi semakin mahal sehingga warga sendiri tidak bisa membeli lahan di sekitar wilayah oro-oro ombo. Menurut mbak devi semakin banyak perumahan baru yang malah dimiliki oleh warga luar kota seperti Kabupaten Malang dan Surabaya yang sengaja membeli rumah di kawasan yang dianggap strategis ini dan kemudian disewakan menjadi *guest house* atau *homestay*. Terjadinya hal tersebut bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan warga asli malah tergusur dari wilayahnya atau bukan lagi warga asli yang tinggal di kawasan daerah sekitar oro-oro ombo.

Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya dampak sosial berupa kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kawasan wisata JTP 2. Pesatnya pembangunan kawasan wisata JTP 2 tidak hanya menawarkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat namun juga bisa menggusur keberadaan masyarakat atas lahannya sendiri. Beberapa hal yang terlihat dari hasil penelitian di atas antara lain:

1. Peningkatan kesejahteraan akibat tambahan ekonomis yang diperoleh warga yang membuka usaha di sekitar lokasi wisata. Kesempatan kerja baru yang dimanfaatkan, setelah sebelumnya hanya menganggur atau sebagai ibu rumah tangga kini beberapa warga bisa membuka usaha kecil dan membantu perekonomian keluarga.

2. Beberapa warga masih merasakan bahwa euforia pembangunan wisata belum bisa dinikmati oleh masyarakat lokal terbukti dengan adanya penyediaan berbagai kebutuhan wisatawan di dalam lokasi wisata.
3. Beberapa warga juga masih mempertahankan mata pencaharian lama sebagai petani dan peternak dengan alasan kurangnya modal jika ingin membuka usaha baru.
4. Terkait dengan semakin mahalnya harga tanah membuat warga lokal tidak mampu membeli lahan di daerah tersebut sehingga banyak rumah dan tanah sudah dimiliki oleh warga luar daerah.

Hal yang sama telah diungkapkan juga dalam penelitian “Dampak Taman Krida Wisata Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 1990 – 2003 (Krisnasari: 2008)” yang menemukan bahwa pembangunan objek wisata di kawasan tersebut memberikan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Sama dengan penelitian oleh “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Pariwisata Sanur, Denpasar – Bali) oleh (Sudarta: 2002)” yang menemukan bahwa pembangunan wisata juga telah menyebabkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi warga lokal.

Sedangkan penelitian lain oleh “*Economic and Social Impact Of Tourism On a Small Town: Peterborough New Hampshire (Tomoko Tsundoda, Samuel Mendlinger: 2009)*” yaitu ketakutan akan adanya polarisasi ekonomi dan pembagian kelas sosial sebagai dampak negatif kesejahteraan sosial tidak sepenuhnya dirasakan oleh warga di daerah oro-oro ombo dan sekitarnya. Terjadinya polarisasi ekonomi mungkin merupakan salah satu hal yang dirasakan oleh warga disini karena faktor kepemilikan modal. Bagi mereka yang memiliki

banyak modal tentunya bisa berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pariwisata di daerah. Namun sebaliknya beberapa warga yang tidak memiliki modal juga masih mempertahankan pekerjaan lama mereka sebagai petani atau peternak di tengah pesatnya pertumbuhan wisata.



BAB V

PERAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA JAWA TIMUR PARK 2 TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR

Selain dampak sosial seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pembangunan kawasan wisata JTP 2 memberikan pengaruh ekonomi terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Munculnya berbagai jenis lapangan pekerjaan baru dan juga tambahan pendapatan merupakan dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat terutama mereka yang berpartisipasi dalam usaha pariwisata. Di bawah ini akan dijelaskan hasil penelitian terkait dengan peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap kondisi ekonomi masyarakatnya.

5.1 Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Kesempatan Kerja Baru

Pembangunan kawasan wisata JTP 2 di daerah oro-oro ombo tentunya menarik banyak wisatawan datang berkunjung ke daerah tersebut. Semakin banyak pengunjung yang datang tentunya akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha yang terlibat langsung dengan penyediaan jasa wisata, misalnya pengelola objek wisata beserta para penyedia kebutuhan wisatawan dan lainnya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari **Bu Mira** selaku pengelola objek wisata JTP 2.

“Pembangunan wisata disini saya pikir memberikan banyak manfaat untuk warganya ya, dibukanya kawasan oro-oro ombo yang dulunya hutan dan terpencil kini menjadi kawasan yang sangat ramai. Ini seharusnya bisa dijadikan kesempatan bagi warga sekitar untuk memanfaatkannya, bisa langsung buka usaha atau kegiatan sehubungan lainnya.”

Bu Mira selaku perwakilan dari pengelola objek wisata menekankan bahwa pembangunan objek wisata JTP 2 secara langsung membuka

kesempatan bagi warga sekitar untuk turut meramaikannya salah satunya melalui pembukaan berbagai jenis usaha. Dengan dibukanya kawasan wisata di daerah desa oro-oro ombo bukan hanya membawa keuntungan berupa pembukaan lahan melainkan akan mengundang banyak orang untuk datang berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut. Dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal melalui penyediaan kebutuhan para pengunjung misalnya saja dengan menjual makanan, aneka souvenir dan barang-barang lain sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Selain membuka usaha yang berhubungan dengan kegiatan wisata, lapangan usaha yang dibuka langsung oleh pihak pengelola sebagai pegawai merupakan salah satu kesempatan yang diharapkan bagi masyarakat. Seperti salah satu teori yang dijelaskan oleh Sammeng (2001) mengenai lapangan kerja langsung, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pada jajaran industri pariwisata, yang menyangkut lini garis depan, yakni petugas yang berhadapan langsung dengan wisatawan atau pekerjaan di “belakang layar”. Jadi yang tergolong lapangan kerja langsung (pariwisata) adalah semua pekerjaan yang tersedia untuk melayani wisatawan dalam perjalanan, misalnya: penyediaan transport wisata, pelayanan tempat menginap dan makan minum serta penyiapan sesuatu untuk dilihat atau dikerjakan oleh wisatawan (dayatarik wisata). Terkait penerimaan tenaga kerja langsung untuk lokasi wisata, pernyataan **Bu Mira** adalah sebagai berikut

“kalau pegawai kita memang membuka lowongan untuk semuanya *mbak*, bukan hanya orang sini saja, ya harus melewati test dan sebagainya. Mengenai kontribusi bagi warga sekitar kita, selama ini sudah memberikan kesempatan untuk menjadi pegawai tapi bukan pegawai tetap. Posisinya juga disesuaikan *mbak*, lha kalo lulusan SMP aja kita kan gak bisa *ngasi* posisi yang bagus, paling hanya tenaga kebersihan”

Pernyataan Bu Mira di atas menunjukkan bahwa kesempatan dibuka bagi masyarakat luas baik yang berasal dari desa oro-oro ombo dan sekitarnya maupun dari daerah lain. Namun sesuai dengan prosedur standart yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen tempat wisata, penerimaan tenaga kerja untuk JTP 2 sendiri harus melalui serangkaian proses pengujian. Bu Mira mengatakan bahwa lapangan kerja untuk masyarakat memang diutamakan namun sesuai dengan kapasitas SDM yang dimiliki, pihak pengelola mengatakan bahwa tingkat SDM yang masih rendah membuat para pelamar kerja yang berasal dari daerah sekitar hanya bisa ditempatkan di posisi tenaga bantu.

Hasil yang sama ditemukan dalam penelitian “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)” yang juga menemukan bahwa adanya pembangunan objek wisata ranu grati telah membuka kesempatan usaha bagi penduduk di sekitarnya baik usaha langsung yang berhubungan dengan pariwisata maupun usaha tidak langsung. Selain lapangan kerja yang berhubungan langsung dengan manajemen objek wisata JTP 2, lapangan kerja lain muncul akibat dibukanya usaha pariwisata lain seperti pernyataan dari **Mas Zaini**, penjual kaos dan souvenir di ruko depan objek wisata JTP 2.

“..saya kan pegawai disini *mbak*, kalau yang punya sendiri orang oro-oro ombo sini aja bikin kaos kita yang nungguin tokonya. Seneng sih *mbak*, gajinya juga lumayan kalau liburan mesti ramai tapi kalau hari biasa gini ya kadang nggak ada pembeli, tapi kan kita pegawai *mbak* jadi gajinya tetap penuh walaupun sepi gini...”

Mas Zaini merupakan salah satu pegawai yang bekerja menjaga toko kaos khas batu yang terletak di ruko depan kawasan wisata JTP 2. Diakui pemilik yang merupakan warga asli daerah oro-oro ombo telah membuka usaha tersebut sejak awal berdirinya lokasi wisata. Toko yang awalnya dijaga sendiri oleh pemiliknya kini telah memiliki dua karyawan yang berasal dari daerah lain namun masih dalam lingkungan Kota Batu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa salah

satu usaha pariwisata mampu membawa tenaga kerja dari daerah lain untuk terlibat secara langsung dalam usaha pariwisata.

Jenis usaha lainnya yang juga menarik banyak tenaga kerja adalah usaha kaos khas batu yang dimiliki oleh **Djono**, perdagangan kaos dan aksesories di pelataran JTP 2.

“untuk produk kita bikin sendiri, kan banyak temen-temen yang bantu kayak desainnya terus tukang jahit dari kita. Tapi kalau sudah liburan ini mbak biasanya kita gak ngatasi, caranya ya kita beli kaos jadi terus disablon sendiri gitu jadi nggak sampai kehabisan stok”

Penjualan kaos oleh-oleh memang selalu diminati banyak wisatawan terutama yang datang dari luar daerah, mengetahui peluang yang tinggi dalam usaha kaos ini Djono dan teman-temannya berinisiatif untuk mendesain kaos, memproduksi dan memasarkannya. Terlihat banyak tenaga kerja yang terlibat mulai dari proses pembuatan hingga penjualan usaha kaos milik Djono ini, mereka yang bekerja sebagai pegawai desain, cetak sablon dan penjahit kaos ini merupakan pihak yang secara tidak langsung terpengaruh oleh adanya pembangunan wisata JTP 2. Seperti teori yang disebutkan dalam Sunaryo (2013) dan Sammeng (2001) mengenai *indirect effect* (dampak tidak langsung) yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pada pabrik, toko dan usaha-usaha lain yang diperlukan oleh pengusaha dan organisasi-organisasi pariwisata yang melayani langsung wisatawan. Lapangan kerja tidak langsung mencakup bidang yang sangat luas, yaitu mulai sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sampai dengan sektor industri manufaktur dan industri jasa.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa pilihan owner Jawa Timur Park Group membuka usaha wisata daerah Oro-Oro Ombo tentunya sudah memiliki banyak pertimbangan untuk memperoleh banyak keuntungan. Daerah Oro-Oro Ombo memiliki lahan hijau yang cukup luas dan kondusif untuk pembangunan lokasi Museum Satwa dan *Batu Secret Zoo* yang memiliki konsep menghadirkan

kehidupan satwa dan juga habitatnya. Oleh karena itu pemilihan lokasi oro-oro ombo mungkin dirasa tepat untuk lokasi wisata yang dimaksud. Dengan adanya pembangunan kawasan wisata tersebut, sektor-sektor lainnya kemudian ikut mengadakan pembangunan terutama sektor lain yang berhubungan dengan pembangunan objek wisata JTP 2. Adanya pilihan pemilik untuk membuka usaha pariwisata di daerah tersebut turut memicu **Ibu Wati** untuk membuka usaha makanan di depan lokasi objek wisata JTP 2.

“pak sastro kan nggak mungkin membangun tempat rekreasi disini kalau nggak laku mbak, lha kalau pak sastro aja berani, kenapa kita enggak? Kan lumayan mbak, kalau liburan saja, pendapatan kami bisa sampai 1 juta lebih.”

Pertimbangan untuk membuka usaha di depan JTP 2 ini salah satunya didasari oleh optimisme owner objek wisata walaupun lokasinya dibangun di daerah pedesaan. Dengan adanya pembangunan JTP 2 ini maka akan membawa banyak wisatawan untuk datang berkunjung. Pertimbangan tersebut yang digunakan oleh Ibu Wati dan hasilnya memang pilihan untuk membuka usaha di depan lokasi wisata JTP 2 membawa keuntungan tersendiri bagi Ibu Wati. Keuntungan lainnya juga dirasakan oleh **Bu. Anis** yang bertempat tinggal di daerah Kelurahan Temas.

“saya merasa diuntungkan dengan dibangunnya kawasan wisata Jawa Timur Park disini, sejak dibangun Jatim Park, saya *kepingin* bisa membuka toko kecil-kecilan yang menyediakan kopi, jajanan kecil, dan makanan lainnya. Daripada nganggur, mbak! Lumayan kalau sehari bisa dapat penghasilan walaupun tidak seberapa. Lumayan, sudah 2 tahun saya membuka warung, penghasilannya sudah cukup-*lah* buat nambah-nambah uang belanja”

Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa pembangunan objek wisata JTP 2 membuka kesempatan berusaha untuk masyarakat lokal seperti Bu Anis. Dengan bermodal sedikit ruangan di rumah dan pembelian bahan baku, maka Bu Anis sudah bisa terlibat langsung dalam menyediakan kebutuhan wisatawan. Meskipun tidak dijadikan sebagai sumber penghasilan utama, diungkapkan

bahwa usaha yang dimilikinya kini telah memberikan sedikit tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Hal berbeda ditunjukkan oleh penelitian “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)” dimana sebagian penduduk lokal menjadikan keterlibatannya dalam usaha pariwisata menjadi mata pecaharian tetap. Dijelaskan bahwa usaha penyedia sewa perahu dan alat pancing merupakan usaha pokok yang merupakan sumber penghasilan utama bagi perekonomian warga, sehingga mereka sangat menggantungkan kebutuhan ekonomi mereka terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa objek wisata ranu grati belum dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian pokok bagi warga karena kontribusi terhadap perekonomian warga masih sedikit.

Selain para pedagang yang membuka usaha di depan kawasan wisata JTP 2 dan juga pedagang di sepanjang jalur lokasi wisata, pertimbangan lain dari para pengusaha untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi wisata adalah berdasarkan pengamatan langsung dari semakin banyaknya jumlah wisatawan yang datang dari tahun ke tahun. Berikut diungkapkan oleh **Tatik**, pedagang kaos dan souvenir yang membuka stand di pelataran depan lokasi wisata.

“Memilih buka disini sebenarnya *gambling* juga *mbak*, dengan biaya sewa segitu perbulan gak gampang juga kan apalagi pengunjung yang datang juga gak tentu. Untuk pilihan buka disini itu karena kita mencari tempat yang mudah dijangkau wisatawan, ini kan ada di depan pelataran, jadi sebelum pengunjung masuk bisa mampir dulu atau pas keluar dan jalan menuju parkir, ya perkiraan kita selalu ada saja pengunjung yang mampir.”

Pengamatan masyarakat mengenai peningkatan jumlah pengunjung objek wisata JTP 2 tiap taunnya tidak disia-siakan salah satunya oleh Tatik selaku pedagang kaos dan souvenir. Berdomisili di daerah Punten, namun dengan melihat kesempatan yang dirasa bisa memberikan keuntungan ekonomis lebih maka tatik memilih untuk menyewa stan di depan pintu loket JTP 2. Dengan

mengambil barang dari pengusaha kaos di daerah malang, keuntungan yang diperoleh cukup besar karena jumlah pembeli yang cukup banyak. Karena lokasi usaha yang berdekatan langsung dengan akses pintu loket dan pintu masuk menuju lokasi wisata, maka jumlah pembeli selalu ramai. Kebanyakan dari mereka yang sedang mengantri loket dan pintu masuk mampir ke stand milik Tatik terutama jika hari libur tiba.

Keuntungan lain karena pilihan membuka stand usaha yang dekat dengan lokasi wisata JTP 2 juga dirasakan oleh **Djono**, pedagang kaos khas batu yang berjualan di daerah pasar wisata.

“...kita lihat kan pengunjungnya museum ini kan ramai terus *mbak*, saya sama temen-temen inisiatif aja buka stan kaos batu sama accesoris ini dan laku. Kalau biaya sewa tempat alhamdulillah masih bisa nutup laah, dengan pendapatan yang lumayan ini toko saya *nggak* pernah sepi apalagi kalau sudah banyak rombongan”

Inisiatif untuk membuka usaha di salah satu objek wisata yang menjadi pilihan populer pengunjung ini membawa keuntungan tersendiri bagi Jono dan teman-temannya. Semakin banyaknya rombongan dan pengunjung yang datang maka pendapatannya bisa dikatakan ikut meningkat, biaya sewa yang mahal dinilai sudah sesuai dengan tempat yang disediakan bagi pihak pengelola wisata. Lokasi usaha yang berada di dalam pasar wisata membuat stand yang dimiliki tidak pernah sepi pengunjung. Jalur khusus juga disediakan bagi para pengunjung yang hampir pasti dilewati oleh wisatawan dari Museum Satwa ke Batu Secret Zoo atau sebaliknya telah diatur sedemikian rupa oleh pihak pengelola agar wisatawan bisa mampir ke pasar wisata yang telah disediakan.

Semakin banyaknya pedagang yang membuka usaha di sekitar lokasi wisata tentunya bisa memicu terjadinya persaingan di antara para pedagang itu sendiri. Namun pernyataan dari **Soleh** rupanya bukan merupakan masalah bagi pedagang yang ada di sekitar lokasi wisata

“Kalau persaingan tidak ada *mbak*, rata-rata disini kan jualan souvenir semuanya, tergantung pilihan konsumen sendiri *sih*. Kalau stand satunya sudah ramai dan penuh pembeli mereka pindah ke tempat satunya lagi. Kalau harga memang dipukul rata semuanya *mbak*, jadi nggak ada yang jual terlalu mahal atau terlalu murah.”

Diakui bahwa jumlah pedagang yang makin banyak di pelataran dan pasar wisata JTP 2 tidak menimbulkan terjadinya persaingan usaha, karena selain harga yang relatif sama barang yang dijualpun juga hampir sama. Mereka berpendapat bahwa selera dan pilihan konsumen yang menentukan dagangan mereka laku atau tidak. Keberadaan stand di pelataran kawasan wisata dan pasar wisata jumlahnya memang dibatasi oleh pihak pengelola sendiri sehingga hal ini bisa membatasi jumlah penjual yang ada di dalam kawasan agar jangan sampai overload. Pun sama halnya dengan para pedagang yang membuka usaha di depan kawasan wisata JTP 2 baik yang ada di ruko, pedagang di pinggir jalan dan juga pedagang gerobak yang biasanya ikut mangkal dikatakan tidak memicu terjadinya persaingan usaha bagi mereka. Seperti yang dikatakan oleh **Djono**,

“Kalau toko-toko di depan sana lebih mahal lagi sebenarnya untuk sewa, tapi tempatnya lebih bagus ya. Saya kurang tau *sih mbak*, tapi toko toko di depan juga sudah dikatakan cukup ramai, apalagi kalau liburan juga banyak pedagang gerobak yang *standby* disana. Itu artinya kan mereka laku juga yang di depan.”

Djono mengakui bahwa bukan hanya pedagang di sekitar pelataran dan pasar wisata saja yang turut merasakan dampak dengan makin ramainya jumlah pengunjung, namun para pedagang lain termasuk pedagang yang berada di depan lokasi wisata maupun yang tersebar di sepanjang jalur lokasi wisata dikatakan juga merasakan dampak yang sama. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung maka makin banyak orang yang membelanjakan uangnya ke toko-toko yang ada di sekitar objek wisata baik untuk pedagang di pelataran atau pasar wisata maupun di depan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa hampir seluruh pedagang yang membuka usaha di daerah desa oro-oro ombo dan

sekitarnya turut merasakan keuntungan akibat memanfaatkan peluang usaha baru yang muncul akibat adanya pembangunan pariwisata di daerah oro-oro ombo.

Ramainya jumlah pengunjung di season tertentu ternyata cukup memberikan pengaruh terhadap pendapatan para pedagang, seperti yang dikatakan **Tatik**,

“...bisa dibilang pedapatan kita ini masuknya cuma hari sabtu, minggu dan liburan sekolah. Beberapa pedagang yang kurang laku juga hanya menyewa sebulan saja dan kemudian dioper ke lainnya *mbak*.”

Mahalnya biaya sewa bagi para pedagang terkadang menjadi permasalahan sendiri ketika jumlah keuntungan yang diterima tidak bisa menutup biaya sewa tempat. Beberapa pedagang di pasar wisata menutup atau mengoper sewa tempat yang dimilikinya karena tidak memperoleh pendapatan yang tidak sebanding, demikian pula para pedagang yang ada di pelataran JTP 2 dengan sistem sewa bulanan, apabila dirasa hasilnya tidak bisa menutup biaya sewa tempat maka mereka tidak lagi memperbarui sewa kontrak tersebut. Hal ini juga dirasakan oleh para pedagang yang berjualan di ruko depan kawasan wisata JTP 2, yaitu **Pak Agus** selaku penjual makanan

“Pendapatan harian nggak tentu, kadang juga gak ada pembeli sama sekali, tapi kalau liburan dan pengunjungnya ramai disini 3 hari (mulai jumat-minggu) dagangan bisa habis.”

Wisatawan yang ramai pada *peak season* (libur nasional, libur hari raya dan libur sekolah) saja membuat pendapatan pedagang di sekitar kawasan objek wisata menjadi tidak menentu. Dikatakan pendapatan pedagang ini mencapai puncaknya saat musim liburan tiba dimana pendapatan mereka bisa meningkat hingga 100%, yang menurut Pak Agus seluruh makanannya habis terjual. Namun apabila hari-hari biasa beberapa toko bahkan tidak dikunjungi pembeli sama sekali. Namun peningkatan pendapatan selama musim liburan ini sudah cukup memberikan keuntungan bagi para pedagang, sehingga untuk menyiasatinya beberapa pedagang ada yang menutup lapaknya ketika hari biasa dan buka

pada saat hari libur saja. Bisa dikatakan bahwa kedatangan pengunjung kawasan wisata JTP 2 merupakan penggerak utama usaha mereka saat ini,

Namun beberapa pihak menyatakan masih membutuhkan campur tangan pemerintah dalam memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal sendiri, seperti pernyataan dari **Bapak Sundjojo** selaku warga lokal berikut.

“...Kalau pemerintah tanggap seharusnya ada kawasan rest area yang bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk jualan dan sebagainya untuk menambah pendapatan masyarakat lokal.”

Harapan Bapak Sundjojo bagi pemerintah adalah agar menyediakan wadah bagi masyarakat lokal yang ingin membuka usaha di sektor pariwisata. Dengan adanya pembangunan *rest area* yang diperuntukkan untuk masyarakat lokal ini diharapkan mampu melindungi usaha masyarakat dari pengusaha luar daerah. Kawasan *rest area* yang dimaksud bertujuan untuk menggiring wisatawan berbelanja di satu tempat saja yang tentunya kepemilikannya harus menjadi milik masyarakat lokal. Hal ini beralasan karena dilihat dari responden dalam penelitian ini, tidak hanya warga lokal saja yang terlibat namun juga beberapa warga yang datang dari luar daerah oro-oro ombo bahkan ada beberapa pedagang yang datang dari luar Kota Batu.

Tabel 5.1 Tabel Responden Menurut Asal

Asal	Jumlah	%
Oro-oro Ombo, Temas, Sisir	12	60%
Luar oro-oro Ombo (Kota Batu)	6	30%
Luar Kota Batu	2	10%
Total	20	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa keterlibatan warga lokal dalam kegiatan wisata belum maksimal. Dari 20 responden, 10% dari jumlah responden ukm atau 2 orang berasal dari Kabupaten Malang yang tidak tinggal menetap di daerah oro-oro ombo. Mereka hanya membuka usaha di lokasi tersebut akibat adanya pembangunan objek wisata JTP 2. Selanjutnya 30% dari jumlah responden ukm atau sekitar 6 orang berasal dari luar daerah berdampak (oro-oro

ombo, temas dan sisir) namun masih dalam wilayah Kota Batu. Sedangkan warga lokal yang turut serta dalam usaha pariwisata terutama melalui perdagangan adalah sebesar 60% atau 12 orang. Oleh karena itu masih diperlukan peranan pemerintah untuk memaksimalkan peran masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha pariwisata. Masih menurut Pak Sundjojo terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan secara langsung bagi warga

“...Tapi saya dengar dari beberapa warga, janjinya dulu kalau akan dibangun museum satwa ini akan ada kesempatan bagi warga untuk dijadikan karyawan dan sebagainya. Tapi kenyataannya juga kita belum merasakan ada kontribusi dari pihak pengelola, yang ada seluruhnya sudah ditangani oleh pihak pengelola dari parkir sampai segala kebutuhan wisatawan sudah ada semua di dalam.”

Pendapat lain sehubungan dengan kesempatan kerja yang timbul akibat pembangunan pariwisata adalah tidak adanya kontribusi dari pengelola objek wisata terutama kontribusi ekonomis. Pak Sundjojo sebagai warga lokal disini merasa bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan wisatawan telah diambil alih oleh pengelola wisata. Penyediaan stand di pasar wisata yang ada di kawasan wisata JTP 2 telah dilengkapi dengan berbagai macam kebutuhan wisatawan seperti souvenir, kaos, kripik, pusat oleh-oleh dan makanan. Selain itu, pak sundjojo berpendapat bahwa hampir tidak ada warga yang diangkat langsung atau ikut serta sebagai pegawai dalam lokasi wisata. Bisa dikatakan bahwa pembangunan JTP 2 disini belum memberikan kontribusi apapun bagi Pak Sundjojo.

Hasil penelitian sehubungan dengan peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap perekonomian warga sehubungan dengan kesempatan kerja baru dan terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal, antara lain:

1. Terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat lokal terutama yang berhubungan dengan usaha pariwisata.
2. Munculnya lapangan kerja baru terutama yang berkaitan dengan usaha pariwisata yang menarik banyak tenaga baik masyarakat lokal maupun luar daerah.
3. Adanya tambahan pendapatan terutama bagi mereka yang membuka usaha berkaitan dengan penyediaan kebutuhan wisatawan.
4. Persaingan usaha yang sehat karena varian produk yang hampir sama dengan harga yang merata.
5. Peranan dan keterlibatan masyarakat lokal yang dinilai masih kurang maksimal terutama peran pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Hal yang sama terkait dengan peranan pembangunan kawasan wisata terhadap perekonomian masyarakat juga diungkapkan dalam *penelitian* “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)” yang menemukan bahwa dalam pembangunan objek wisata ranu grati menyebabkan terbukanya kesempatan berusaha bagi penduduk (langsung maupun tidak langsung). Namun Ranu Grati belum dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian pokok bagi warga karena kontribusi terhadap perekonomian warga masih sedikit. Hal ini dikarenakan banyak warga lokal yang menggantungkan usaha wisata sebagai mata pencaharian utama, sehingga kunjungan wisatawan memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan masyarakat. Lain halnya yang terjadi di oro-oro ombo yang kebanyakan usaha kecil milik warga lokal dibuka karena adanya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan dan bukan dijadikan sebagai sumber pendapatan utama warga.

Penelitian lain yaitu “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Pariwisata Sanur, Denpasar – Bali) oleh Sudarta (2002)” juga menemukan bahwa pembangunan objek wisata di daerahnya telah membawa perubahan jenis pekerjaan di sektor non-pariwisata menjadi sektor pariwisata. Hal ini mungkin berlaku bagi sebagian kecil masyarakat saja karena hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat lokal yang membuka usaha mengakui bahwa usaha pariwisata merupakan usaha yang baru diminati setelah adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2 di daerahnya tersebut. Beberapa warga oro-oro ombo mengatakan bahwa pilihan untuk membuka usaha dari yang dulunya hanya pengangguran atau hanya sebagai ibu rumah tangga bahkan dilakukan setelah melihat kawasan daerahnya semakin ramai.

Penelitian lain yang dilakukan yaitu “*Economic and Social Impact Of Tourism On a Small Town: Peterborough New Hampshire* (Tomoko Tsundoda, Samuel Mendlinger: 2009)” malah menemukan bahwa pembangunan pariwisata di daerahnya tidak memberikan banyak pengaruh terhadap perekonomian warga, tapi memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah pada umumnya. Kebanyakan dari masyarakat mengakui bahwa adanya komersialisasi di daerahnya membuat biaya untuk restoran dan tempat hiburan kini semakin mahal yang dirasakan semakin merugikan warga asli. Pada akhirnya sebagian besar warga New Hampshire enggan melakukan perubahan dan modernisasi untuk daerahnya demi penyediaan fasilitas penunjang pariwisata.

5.2 Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Alih Fungsi Lahan

Selanjutnya peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap perekonomian masyarakat sekitar ditunjukkan dari adanya alih fungsi lahan yang dimiliki oleh warga sekitar. Berikut pernyataan Pak Dedi selaku pemilik usaha guest house di daerah oro-oro ombo.

“Kalau saya sendiri sebenarnya tidak kepikiran sampai membuka homestay *mbak*, karena ini kan awalnya rumah tinggal yang memang kami bangun sendiri. Namun disini kan banyak sekali rumah rumah yang ditawarkan menjadi *homestay*, *guest house* dan laku, kemudian saya berpikir untuk mengubah rumah tinggal saya sebagai *homestay* wisatawan sedangkan saya sendiri punya rumah tinggal di daerah Temas. Lumayan untuk semalam saja saya bisa memperoleh pendapatan > 1jt rupiah setelah dibagi dengan kebersihan dan tukang jaga bisa dikatakan masih untunglah *mbak*.”

Pembangunan objek wisata lambat laun memicu daerah sekitarnya untuk menyediakan segala kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Selain penyediaan makanan dan juga segala souvenir, akomodasi berupa penginapan wisatawan merupakan komponen penting yang harus tersedia di daerah sekitar lokasi wisata. Masyarakat yang awalnya tidak pernah mengenal budaya, sistem dan kebiasaan untuk mengelola *homestay* dan *guest house* kini dituntut untuk bisa menyediakan tempat tersebut akibat banyaknya pengunjung. Pilihan pak dedi untuk menjadikan rumahnya sebagai *guest house* merupakan salah satu dampak banyaknya usaha *guest house* di dekitarnya yang selalu laku dibeli wisatawan. Pendapatan yang diperoleh telah membuat pak dedi bahkan merubah fungsi rumah tinggal menjadi usaha penuh, dan membeli rumah di daerah lain yang jauh dari keramaian wisatawan.

Tuntutan akan peningkatan kebutuhan jasa guest house dan homestay wisatawan tersebut meningkat seiring dengan semakin banyaknya wisatawan

yang berlibur ke Kota Batu terutama JTP 2 apalagi bila musim libur panjang tiba.

Hal ini didukung dengan pernyataan **Putra** selaku koordinator guest house dan homestay di daerah oro-oro ombo.

“Penyewa homestay disini nggak selalu yang berlibur di sekitaran saja, biasanya memang pengunjungnya sengaja liburan keliling kota dan memilih menginap. Kalau untuk rombongan dan keluarga menyewa hotel semalam saja kan mahal dan tidak senyaman di guest house atau homestay. Biasanya rombongan keluarga yang sering menggunakan homestay kami, bisa menginap hingga 2-3 hari.”

Banyaknya wisatawan yang mulai melirik *homestay* dan *guest house* sebagai pilihan menginap membuat usaha ini makin menjamur terutama di daerah oro-oro ombo. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kebutuhan pokok wisatawan ini untuk merubah rumahnya sebagai rumah sementara para wisatawan. Banyaknya pilihan wisata di Kota Batu menjadi alasan para pengunjung wisata tinggal lebih dari 3 hari di Kota Batu. Letak desa oro-oro ombo yang berdekatan dengan objek wisata BNS dan JTP 2 membuat kawasan ini strategis untuk ditinggali wisatawan. Selain hotel, *homestay* dan *guest house* merupakan alternatif lain yang lebih murah yang bisa dipilih wisatawan untuk menginap di daerah tujuan wisata.

Dalam pengelolaan usaha *guest house*, disarankan untuk tidak menggabungkan kegiatan rumah tangga dengan usaha. Tidak hanya memisahkan keluarga ini dengan wisatawan namun beberapa orang menawarkan space kosong dirumahnya untuk ditinggali sementara oleh para wisatawan, seperti pernyataan **Nanang** selaku pemilik usaha homestay,

“...memang di rumah banyak kamar kosong mbak, jadi daripada nganggur kan lumayan bisa nambah-nambah kalau dijual jadi homestay. Ini juga banyak temen yang nitip, dipromosikan rumah-rumahnya kan banyak ini mbak yang disewakan juga. Ya tinggal disini, tapi kamarnya disewakan kalau pas penuh ya yang punya rumah ngungsi dulu”

Peningkatan jumlah pengunjung bahkan diakui bisa membuat rumah-rumah yang disewakan per-kamar juga penuh, beberapa dari mereka yang

menyewakan rumahnya sampai harus mengungsi di tempat lain seperti sanak saudara dan tetangga lainnya. keuntungan ekonomi merupakan alasan utama banyak warga yang rela meninggalkan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat usaha. Pengalihan fungsi rumah tinggal yang awalnya dipakai untuk kegiatan keluarga kini makin bergeser menjadi tempat usaha yang malah menggusur pemilik rumah sendiri.

Hal tersebut cukup beralasan apabila jumlah wisatawan yang datang bisa meningkat hingga 200% di hari libur, seperti pernyataan **Mbak Devi**,

“saya ngumpulin homestay sama guest house sekitar sini kok mbak, bukan punya orang sini aja kalau di perumahan itu malah kebanyakan punya orang surabaya sama luar kota. Lumayan rame apalagi kalau mendekati liburan, yang pesen malah sudah jauh-jauh hari, sini bisa penuh semua.”

Peak season (libur hari besar, libur nasional dan liburan sekolah) membuat pengunjung objek wisata JTP 2 membludak, tak sedikit pula dari mereka yang datang dari luar kota telah memesan jasa *guest house* atau *homestay* untuk keluarga yang ingin menghabiskan liburan panjang di Kota Batu. Devi mengakui bahwa peminat *homestay* dan *guest house* semakin meningkat karena jumlah lokasi wisata di Kota Batu semakin variatif, selain itu untuk rombongan keluarga saja bisanya terlalu mahal untuk menginap di hotel kebanyakan dari mereka memanfaatkan jasa *guest house* dan *homestay* untuk menghabiskan liburannya.

Dari hasil penelitian di atas, peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap alih fungsi lahan masyarakat bisa disimpulkan sebagai berikut,

1. Terjadinya pergeseran fungsi rumah tinggal yang dijadikan sebagai lokasi usaha untuk *guest house* dan *homestay* yang malah menggusur warga itu sendiri.
2. Alih kepemilikan bangunan dan tanah yang kini malah banyak dimiliki oleh warga luar daerah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “*An Identification Of The Effects of the Promotion of Tourism Transportation on the Socio-Cultural Environment: The Case of Malaysia by Sharon Cheuk, Janie Liew-Tsonis, Grace Phang Ing and Izyanti Awang Razli (2010)*” juga menunjukkan bahwa adanya promosi pariwisata yang dilakukan mengundang semakin banyaknya wisatawan menyebabkan mulai terganggunya kehidupan dan aktivitas masyarakat lokal. Hal ini juga yang terjadi pada warga daerah oro-oro ombo yang mengaku bahwa tuntutan akan pemenuhan kebutuhan akomodasi wisatawan dan juga tambahan ekonomis yang diterima membuat warga rela diungsikan untuk kemudian rumahnya dikomersialisasikan menjadi tempat usaha.

5.3 Peran Pembangunan Kawasan Wisata JTP 2 terhadap Akses

Peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 selanjutnya adalah terhadap akses bagi masyarakat baik jangkauan masyarakat terhadap daerah lain maupun akses masyarakat untuk membuka usaha di dalam lokasi wisata sendiri. Akses sehubungan dengan jangkauan masyarakat bisa berhubungan dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, sedangkan akses usaha sendiri berhubungan dengan kesempatan warga untuk membuka usaha di kawasan wisata JTP 2.

Selain penggunaan lahan, pembangunan objek wisata JTP 2 diharapkan dilengkapi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai yang mendukung kelancaran usaha lainnya. Seperti yang dikatakan **Mbak Dewi** selaku pedagang di ruko depan kawasan wisata JTP 2,

“Dan jalanan di depan ruko ini *mbak*, kalau hujan sudah banyak genangan air seharusnya pihak pengelola tanggap juga karena kalau sudah banyak genangan disini orang yang beli juga males.”

Para pedagang mengharapkan bahwa pihak pengelola juga harus memperhatikan kondisi di sekitar lokasi wisata termasuk pusat perdagangan yang terletak tepat di depan lokasi wisata. Mereka berpendapat bahwa

pembangunan di sekitar objek wisata merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak pengelola selaku pemilik utama usaha pariwisata. Pendapat ini didasari oleh adanya pelebaran jalan yang dilakukan pihak pengelola karena jalanan lama tidak lagi menampung jumlah kendaraan yang lewat. Para pedagang berpendapat bahwa dengan adanya pelebaran jalan tersebut, makin membuat lahan serapan air hujan menjadi berkurang sehingga menimbulkan adanya genangan air saat hujan tiba. Oleh karena itu mereka mengharapkan pemerintah dan pengelola cepat tanggap dalam menangani hal tersebut mengingat para pedagang ini juga merupakan pihak penunjang usaha pariwisata JTP 2.

Selain kebutuhan fasilitas untuk pedagang, pihak pengelola lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur pendukung objek wisata itu sendiri. Untuk mendukung kelancaran pengembangan kawasan wisata JTP 2 pihak pengelola juga telah mempersiapkan banyak hal seperti pernyataan dari **Bu Mira** di bawah ini

“Target selanjutnya masih dalam proses adalah Eco Green Park yang kita bangun di kawasan Jawa Timur Park 2 juga, perluasan akses parkir untuk bis wisata dan kendaraan pribadi, serta kemudahan akses ke kawasan wisata lainnya. Dari JTP 1 ke JTP 2 ini nantinya akan ada jalan terusan mbak, jadi wisatawan tidak kesulitan kalau membeli tiket paket terusan itu. Kami juga menyediakan kereta khusus yang digunakan untuk mengangkut wisatawan dengan tiket terusan JTP 1 dan JTP2.”

Peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun membuat pihak pengelola ingin melengkapi fasilitas dan meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung. Perluasan lahan parkir dikatakan menjadi perhatian bagi pihak pengelola mengingat banyak kendaraan rombongan yang tidak bisa parkir di lokais parkir yang legal disediakan pihak pengeloa. Selain perluasan lahan parkir, untuk membagi keramaian dengan JTP 1, pihak pengelola JTP 2 juga membangun jalan khusus yang menghubungkan JTP 2 langsung dengan JTP 1 yang melewati daerah kelurahan sisir. Dengan adanya peningkatan fasilitas

tersebut diharapkan pengunjung menggunakan promosi dari pihak pengelola untuk tiket terusan JTP 1 dan JTP 2. Selain akses yang terhubung langsung di antara kedua objek wisata tersebut, pengelola juga menyediakan kendaraan khusus yang mengangkut penumpang dengan tiket terusan. Upaya pengelola untuk terus memperbaiki infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan para pengunjung sehingga pendapatan mereka juga akan terus bertambah.

Selain pihak pengelola, pendapat lain mengenai perubahan infrastruktur yang terjadi setelah adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2 adalah

“...ditambah dengan pembangunan Jawa Timur Park 2 yang semakin membuka wilayah desa ini ya. Dulu disini kalau malem sudah gak ada yang berani lewat, kan jalannya kecil, hutan, gelap, belum ada lampu kayak sekarang. Sekarang sudah terang, angkot juga lewat daerah sini sampe sore”

Bu Sri sebagai warga lokal mengaku jika pembangunan fasilitas umum seperti pelebaran dan perbaikan jalan serta penerangan dan jangkauan transportasi umum di daerah oro-oro ombo dikatakan membawa keuntungan tersendiri bagi warga. Dengan adanya peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maka akses jangkauan menuju daerah oro-oro ombo juga menjadi lebih mudah. Warga tidak lagi kesulitan menjangkau daerah lain dikarenakan transportasi yang berani beroperasi lebih lama dari sebelum dibangunnya kawasan wisata JTP 2 tersebut. Pernyataan lainnya dari **Pak Agus** selaku warga lokal yang membuka usaha di ruko depan kawasan wisata JTP 2.

“sejak dibukanya desa oro-oro ombo ini sebagai lokasi wisata, perbaikan benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jalanan depan jadi lebar, ini jalan masuk gang saja sudah di aspal lagi jadi lebih enak dilewati mobil-mobil. Dulu tukang jualan pulsa jauh harus ke kota dulu, sekarang mulai pedagang sayur sampai pulsa sudah lengkap disini mbak gak usah jauh-jauh.”

Dengan adanya perbaikan infrastruktur, ketersediaan kebutuhan masyarakat kini dirasa lebih mudah. Dengan mudahnya akses masyarakat untuk

menjangkau kawasan oro-oro ombo membuat warga merasa bahwa kawasan daerahnya kini semakin ramai. Berbagai jenis usaha kini baik yang berhubungan dengan kebutuhan wisatawan maupun kebutuhan masyarakat kini sudah tersedia di daerah oro-oro ombo yang dulunya merupakan kawasan terpencil.

Dari hasil penelitian di atas, peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap alih fungsi lahan masyarakat bisa disimpulkan sebagai berikut,

1. Adanya perbaikan infrastruktur oleh pihak pengelola wisata terutama yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan kenyamanan wisatawan.
2. Adanya perbaikan infrastruktur bagi warga seperti perbaikan jalan, penerangan dan transportasi umum yang memudahkan akses masuk ke daerah oro-oro ombo dan sekitarnya.

Hasil penelitian “Analisa Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya (Setyowibowo: 2010)” juga menemukan bahwa adanya pembangunan pariwisata memicu tersedianya berbagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata, jalur transportasi dan penerangan lebih baik yang juga dinikmati oleh masyarakat sekitar. Namun penelitian lain yaitu “Dampak Kegiatan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat Kawasan Terumbu Karang di Padaido dan Biak Timur Daratan” menyatakan bahwa adanya pembangunan wisata belum memberikan pengaruh terhadap perbaikan sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas sehingga banyak kebutuhan wisatawan yang disediakan disediakan di daerah perkotaan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, kuisisioner dan pengumpulan catatan, kepada responden yang berasal dari pihak pengelola, warga lokal yang tidak terlibat dalam usaha pariwisata, warga lokal yang terlibat dalam usaha pariwisata serta para pedagang yang berada di sekitar kawasan berdampak yaitu desa oro-oro ombo, kelurahan sisir dan kelurahan temas diketahui bahwa peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Adapun peran pembangunan kawasan wisata JTP 2 terhadap kondisi sosial masyarakat anatara lain munculnya keramaian yang bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pihak pengelola dan bagi warga sekitar yang membuka usaha bidang pariwisata karena jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, makin variatifnya dagangan yang ditawarkan juga menjadi pemicu banyaknya wisatawan yang mampir untuk berbelanja pada pedagang di sekitar lokasi wisata. Kemacetan dan juga mulai terganggunya aktifitas warga sehari-hari juga menjadi dampak yang muncul akibat adanya keramaian yang dipicu oleh banyaknya kunjungan wisatawan.

Berikutnya adanya pengaruh pembangunan pariwisata terhadap kondisi lingkungan sekitarnya yaitu kerusakan lingkungan yang terjadi karena penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan sehingga menyebabkan perubahan iklim, banjir dan kepadatan yang mulai dirasakan warga. Kondisi sosial budaya juga terpengaruh secara langsung akibat adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan wisatawan terutama yang menginap di homestay atau

guest house, pengaruh yang dimaksud adalah dengan mulai bergesernya budaya lokal seperti cara berpakaian dan perilaku terutama yang mempengaruhi generasi muda di daerah tersebut.

Di samping itu, pembangunan pariwisata bisa memicu terjadinya kesenjangan sosial karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilik modal yang bisa ikut serta dalam meramaikan pembangunan pariwisata melalui pembukaan usaha pariwisata. Namun beberapa warga masih mempertahankan mata pencaharian lama mereka untuk beternak dan bertani walaupun desanya telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kenaikan harga tanah yang tidak lagi bisa diakses warga lokal menjadikan sebagian tanah di sekitar lokasi wisata kini telah dimiliki oleh warga luar yang bukan warga asli.

Selanjutnya adalah dampak ekonomi yang muncul akibat adanya pembangunan kawasan wisata JTP 2 adalah membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sekitar terutama yang berhubungan langsung dari pariwisata sehingga bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan masyarakatnya. Namun di sisi lain tuntutan akan pemenuhan kebutuhan wisatawan membuat sebagian warga malah tergusur dari daerahnya, alih fungsi rumah tinggal sebagai homestay dan guest house malah menuntut beberapa keluarga mengungsi ke rumah tetangga atau saudaranya sementara rumahnya digunakan untuk penginapan wisatawan. Yang terakhir bahwa pembangunan kawasan wisata JTP 2 telah memicu terjadinya berbagai perbaikan infrastruktur yang mempermudah akses warga untuk segala kegiatan ekonomi yang dilakukan serta mempermudah akses transportasi umum dan jangkauan ke wilayah desa-desa yang sebelumnya dikatakan sangat menguntungkan warga.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi pemerintah maupun pihak pengelola dalam memperhatikan pembangunan pariwisata di suatu daerah terutama di Kota Wisata Batu.

1. Perencanaan pembangunan pariwisata dengan melibatkan komponen masyarakat terutama yang tinggal di sekitar lokasi wisata, dimulai dari rembug awal rencana pembangunan, penggunaan lahan milik masyarakat lokal serta pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran pembangunan pariwisata.
2. Adanya pembangunan kawasan wisata di suatu daerah seharusnya bisa benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan warga di sekitar lokasi wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata harus didukung baik oleh pihak pengelola dan juga pemerintah daerah. Sinergitas tersebut bisa melalui pembangunan kawasan wisata terpadu yang memasukkan usaha warga di dalam kawasan wisata secara langsung dengan tujuan mendorong kegiatan ekonomi warga melalui perdagangan. Pasar wisata yang terorganisir dan diletakkan di sekitar kawasan wisata merupakan salah satu pilihan untuk menggabungkan usaha warga dengan keberadaan objek wisata, bertujuan untuk mengarahkan para wisatawan untuk berbelanja di kawasan sekitar saja dan menguntungkan para pembeli yang tentunya harus dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dengan demikian diharapkan masyarakat sekitar bisa terlibat dan mendapatkan keuntungan ekonomis secara langsung dari adanya pembangunan kawasan wisata di daerahnya.

3. Penampilan budaya sendiri perlu dipertimbangkan sebagai ajang pertunjukan yang bisa melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Mengingat kebudayaan lokal di Kota Batu sendiri yang cukup banyak, seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai atraksi yang ditampilkan ketika wisatawan datang berkunjung ke lokasi wisata yang ada di Kota Batu. Oleh karena itu, pihak pengelola juga harus menyediakan stand tersendiri untuk menampilkan pertunjukan budaya lokal dimana pesertanya merupakan warga lokal. Selain mendapatkan keuntungan berupa pengenalan budaya lokal, atraksi ini bertujuan untuk menjaga eksistensi budaya yang dimiliki warga sendiri.
4. Untuk mengurangi terjadinya dampak lingkungan yang timbul sebaiknya pemerintah segera melakukan upaya untuk mengembalikan lagi atau mengganti lahan hijau yang telah digunakan untuk pembangunan kawasan wisata JTP 2. Selain itu pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hasil AMDAL yang dilaporkan sebelum dilakukannya pembangunan objek wisata untuk memastikan apakah pembangunan tersebut layak dan tidak membawa banyak kerugian bagi lingkungan sekitarnya.
5. Dibutuhkan keberadaan lembaga masyarakat yang berfungsi untuk mengkoordinir dan mengatur usaha-usaha sehubungan dengan pariwisata itu sendiri. Lembaga ini mengelola usaha yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan wisatawan, tentunya dengan melibatkan usaha yang dimiliki masyarakat lokal. Misalnya penyediaan kendaraan/ angkutan dari tempat parkir menuju lokasi utama pariwisata, penyediaan kebutuhan konsumsi dan oleh-oleh bagi wisatawan untuk diarahkan dalam lokasi terkoordinasi yang diisi oleh para pedagang lokal, mengkoordinasi berbagai atraksi yang dipertunjukkan untuk para wisatawan dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga masyarakat ini harus didukung oleh pihak pengelola dan juga

pemerintah dengan tujuan untuk turut serta mengarahkan wisatawan, atau bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak pengelola sendiri dalam menunjang berbagai kebutuhan wisatawan.

6. Sebaiknya pemerintah mulai mencoba bentuk wisata dengan konsep pemberdayaan masyarakat atau CBT (*Community Based Tourism*), dimana konsep pembangunan pariwisata ini membutuhkan keterlibatan penuh dari masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Dengan menjamin eksistensi dan juga kesejahteraan masyarakat lokal, serta tidak melakukan eksploitasi berlebihan kepada lingkungan alam diharapkan CBT menjadi alternatif pembangunan pariwisata selanjutnya di Kota Wisata Batu.



DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Badan Pusat Statistik Kota Wisata Batu. 2011. Publikasi BPS: Kota Batu Dalam Angka 2012. <http://batukota.bps.go.id/> diakses pada 25 Mei 2014

Badan Pusat Statistik Kota Wisata Batu. 2012. Publikasi BPS: Kota Batu Dalam Angka 2012. <http://batukota.bps.go.id/> diakses pada 25 Mei 2014

Badan Pusat Statistik Kota Wisata Batu. 2013. Publikasi BPS: Kota Batu Dalam Angka 2013. <http://batukota.bps.go.id/> diakses pada 25 Mei 2014

Cheuk, Sharon., Janie, Liew-Tsonis., Grace, Phang Ing., Razli, Izyanti Awang. 2010. An Identification of The Effects of The Promotion of Tourism Transportation on The Socio-Cultural Environment: The Case Of Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, Vol 12: 430-440. http://www.europeanjournalofsocialsciences.com/issues/ejss_12_3.html diakses pada 2 Mei 2012

Coremap. 2002. Dampak Kegiatan Wisata Bahari Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kawasan Terumbu Karang Kepulauan Padaido dan Biak Timur Daratan. http://www.coremap.or.id/research_agenda/article.php?id=218

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 2013. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Jawa Timur. <http://disbudpar.jatimprov.go.id> diakses pada September 2013

Indriantoro, Nur., Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT. BPFE

Irianto. 2011. Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Gili Trawangan Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 7 (No.3): 188-196. http://blognyaekonomi.files.wordpress.com/2013/06/1335945610_irianto.pdf diakses pada 2 Mei 2012

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2014. Siaran Pers: Kuartal I/ 2014 Pertumbuhan Kunjungan Wisman Tembus Dua Digit, Wisman RRT Alami Pertumbuhan Tinggi. <http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?id=2604> diakses pada 23 Juni 2014

Krisnasari, Dieta Widya. 2008. Dampak Taman Krida Wisata Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Wergu Wetan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Tahun 1990 – 2003. Universitas Diponegoro <http://eprints.undip.ac.id/3331/> diakses pada 2 Mei 2012

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. (Ed.29). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Pitana, I Gde & Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset

Pitana, I Gde. & Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-Dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset

Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka

Setyowibowo, R. Dhiemas. 2010. Analisis Pengaruh Keberadaan Obyek Wisata Ranu Grati Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Ed.6). Bandung: Alfabeta

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Tagel, I Wayan. 2002. Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Pariwisata Sanur, Denpasar-Bali). Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/10986/> diakses pada 2 Mei 2012

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara

Tempo. 2014. Pariwisata Indonesia Lampau Pertumbuhan Ekonomi. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/06/202559869/Pariwisata-Indonesia-Lampau-Pertumbuhan-Ekonomi> diakses pada 23 Juni 2014

Tempo. 2014. Pariwisata Indonesia Lampau Pertumbuhan Ekonomi. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/06/202559869/Pariwisata-Indonesia-Lampau-Pertumbuhan-Ekonomi> diakses pada 23 Juni 2014

Tourism Concern. 2014. Tourism Concern Action For Ethical Tourism: What Is Community Tourism?. <http://www.tourismconcern.org.uk/community-tourism.html> diakses pada 23 Juni 2014

Tsundoda, Tomoko & Mendlinger, Samuel. 2009. Economic and Social Impact of Tourism on a Small Town: Peterborough New Hampshire. *Journal Service Science & Management*, Vol. 2: 61-70. <http://www.SciRP.org/journal/jssm> diakses pada 7 September 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

<http://pusdaling.jatimprov.go.id/peraturan/pusdakum/undang-undang>

diakses pada 11 Agustus 2011

Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi. 2010. *Buku Pedoman: Penulisan Skripsi, Laporan KKN-P, Artikel dan Makalah*. Malang

Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Ed.4. (Frans Gromang), Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Yoeti, Oka A. 2006. *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Yoeti, Oka A. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

